



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI V DPR RI
DENGAN
MENTERI PERHUBUNGAN RI, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT RI, KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI DAN GEOSFIKA, KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS), DAN KEPALA
KOORDINATOR LALU LINTAS POLRI**

Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- : Ke-13
Jenis Rapat : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), dan Kepala Koordinator Lalu Lintas POLRI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 15 Februari 2023
Waktu : Pukul 10.05--13.25 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI dan Virtual Zoom
Acara : Membahas evaluasi pelaksanaan angkutan libur Natal 2022 dan tahun baru 2023
Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si.
(Ketua Komisi V DPR RI/F-PDI Perjuangan)
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI

Hadir : PIMPINAN
1. Lasarus, S.Sos., M.Si. (Ketua Komisi V DPR RI/F-PDI Perjuangan)
2. Ir. Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-PG)
3. Robert Rouw (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-Nasdem)

ANGGOTA
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)
4. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
5. Mochamad Herviano
6. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.

7. Sukur H. Nababan, S.T.
8. Ir. Sudjadi
9. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
10. Sri Rahayu
11. Ir. Effendi Sianipar
12. Harvey B. Malaihollo
13. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos.,
MCOMM&MEDIAS.
14. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H.

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

15. Drs. Hamka B Kady, M.S.
16. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.SI.
17. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
18. Muhammad Fauzi, S.E.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

19. Ir. Sumail Abdullah
20. Sudewo, S.T., M.T.
21. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
22. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
23. Drs. H. Mulyadi, M.MA.

FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

24. Drs. H. Tamanuri, M.M.
25. Drs. H. Soehartono, M.Si.
26. Sri Wahyuni

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

27. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.
28. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
29. H.Dedi Wahidi, S.Pd.
30. Sofyan Ali, S.H.
31. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
32. Syafiuddin, S.Sos.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

33. Dr. H. Irwan, S.IP., M.P.
34. Willwm Wendik
35. Drs. Anwar Hafid, M.Si.
36. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

37. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
38. Ir. H. Sigit Sosiantomo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

39. H. A. Bakri H.M., S.E.
40. Hj. Hanna Gayatri, S.H.

41. H. Boyman Harusn, S.H.
42. Mesakh Mirin, SKM.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(F-PPP)

-

- Izin :
1. Cen Sui Lan (F-PG)
 2. Ilham Pangestu (F-PG)
 3. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M. (F-Gerindra)
 4. Drs. Fadoli, M. Ikom. (F-Nasdem)
 5. Lasmi Indrayani, S.E. (F-PD)
 6. Dr. H. Muh. Aras, S.Pd., M.M. (F-PPP)
- UNDANGAN :
1. Menteri Perhubungan RI (Ir. Budi Karya Sumadi) dan jajaran.
 2. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc.) dan jajaran.
 3. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.) dan jajaran.
 4. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS (Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, M.Han.) dan jajaran.
 5. Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas POLRI (Brigjen. Pol. Drs. Ery Nursatari, M.H.) dan jajaran.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang

terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,

Yang terhormat, Saudara Menteri Perhubungan bersama seluruh jajarannya,

Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Saudara Dirjen Bina Marga,

Bapak-Ibu sekalian,

Pak Menteri PUPR, ada membuat surat, karena pada saat bersamaan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan,

Yang saya hormati Saudara Kepala BMKG, informasi masih di perjalanan beserta seluruh jajarannya yang sudah hadir di ruangan rapat ini,

Yang terhormat Saudara Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas beserta seluruh jajarannya,

Saudara korps, Kepala Korps Lalu Lintas POLRI, yang diwakili oleh Direktur Keamanan dan Keselamatan. Terima kasih. Pak Ery, Brigadir Jenderal Polisi Ery,

Para direksi dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang transportasi yang kami hormati,

Menurut data yang sampai di meja kami, ada Direksi Perum LPPNPI atau AirNav, ada?

Dari Direksi maskapai penerbangan Garuda. Garuda, ada? tidak ada Garuda.

Kemudian Lion Air, ada, garuda ada? itu Lion, oh, ada *capt*, kaptennya, Terima kasih, *capt*.

Garuda ada? mana Garuda? Oh ya, dari Garuda Pak ya? Bapak dari Garuda? ya? Oh, Direktur Operasi, Pak ya, Perbasi Garuda, Pak Tumpak Manupak Hutapea, ya.

Kemudian dari Sriwijaya Air, ada Sriwijaya? Sriwijaya *enggak* ada ya? kalau daftar yang hadir di sini, dari Sriwijaya itu Pak Tampubolon, belum sampai, mudah-mudahan nanti datang, karena ada yang mau kita konfirmasi nanti dengan Sriwijaya, terkait santunan.

Kemudian dari Direksi AP 1 dan AP 2 ya, tadi di luar sudah ngobrol.

Baik. Dari Direksi Pelindo Persero, virtual ya?

Perindo virtual.

Kemudian Perum DAMRI, ya silakan Bu, terima kasih.

Kemudian dari Direksi, Direksi PT ASDP Indonesia Ferry. Baik, terima kasih Bu.

Direksi PT Pelni, virtual dan Direksi PT KAI, tadi saya sudah lihat seragamnya ya, terima kasih.

Dan dari Direksi perusahaan operator tol di lintas pulau Jawa, virtual.

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,
Itulah undangan rapat kita pada hari ini.

Mengawali rapat hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada rapat siang hari ini dalam rangka evaluasi Nataru, Natal dan tahun baru. Rapat ini masih dihadiri secara fisik maupun virtual.

Menurut data informasi dari Sekretariat Komisi, Komisi V yang hadir pada hari ini 25 orang, 10 secara fisik dan 15 orang virtual dari 7 unsur fraksi yang berbeda. Biasanya, semakin siang, semakin banyak yang datang.

Menurut ketentuan Pasal 281 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkan kami membuka rapat pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1), Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI pada hari ini, dalam rangka evaluasi Natal dan Tahun Baru, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.05 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Perhubungan, Menteri PUPR atau yang mewakili, dari Basarnas, BMKG, Korlantas Mabes Polri, beserta seluruh jajaran dan seluruh undangan yang berbahagia.

Silakan, Ibu.

Bapak-Ibu sekalian,

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pelaksanaan pada setiap bulan Desember, saudara-saudara kita yang beragama Kristen melaksanakan perayaan Natal, satu minggu kemudian, sebagian besar dari kita merayakan datangnya tahun baru. Kondisi meningkatnya kebutuhan transportasi darat, laut dan udara secara tajam pada rentang waktu yang pendek, merupakan hal yang tidak dapat dihindari.

Oleh karena itu, terpenuhinya aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam semua sektor pelayanan transportasi merupakan hal yang memerlukan perhatian dari kita semua. Sesuai dengan daftar undangan tadi yang kami bacakan, kita semua adalah yang terlibat dalam kegiatan angkutan tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI, termasuk hasil evaluasi atas pelaksanaan-pelaksanaan Natal dan tahun baru, beberapa langkah strategis yang perlu dapat perhatian antara lain:

Yang pertama, peningkatan pengawasan bagi operator di setiap moda transportasi, agar sarana transportasi massal memenuhi aspek keselamatan, kelaikan keamanan, kenyamanan, dan melaksanakan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan para pengemudi.

Yang kedua, masih terdapat percaloan tiket pada pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut dan terminal penumpang yang mengakibatkan data manifes tidak akurat.

Berikutnya, progres penyampaian informasi dan edukasi terkait cuaca ekstrem kepada instansi dan masyarakat, khususnya pengguna transportasi massal secara cepat dan tepat kita perlukan.

Yang berikutnya, keempat masih terdapat kecelakaan lalu lintas selama Nataru yang mencapai 11%. Bagaimana Korlantas POLRI mengantisipasi permasalahan ini supaya angka kecelakaan, terus dapat kita tekan.

Kemudian yang kelima, mengidentifikasi hambatan kelancaran pelaksanaan Natal dan tahun baru 2023, kesiapan sarana dan prasarana konektivitas antar moda transportasi, evaluasi ini kita anggap penting, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kita juga akan menghadapi lebaran. Tentu sudah menjadi rutinitas kita, Pak Menteri dan para hadirin yang kami hormati. Setiap kali Nataru dan lebaran, kita melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek keselamatan, kenyamanan bertransportasi sesuai Tupoksi kita masing-masing. Tentu, *leading sector*-nya adalah Kementerian Perhubungan.

Kemudian transportasi yang nyaman dan nyaman ini juga ada kaitannya dengan infrastruktur yang tersedia baik jalan, pelabuhan, bandara, dan seterusnya yang diperlukan.

Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, Komisi V DPR RI ingin mendengarkan penjelasan secara komprehensif dari Menteri Perhubungan dan seterusnya nanti dari masing-masing kementerian/lembaga untuk menyampaikan kepada kami apa saja temuan dalam menghadapi Natal dan tahun baru kemarin.

Dan apa yang diperlukan dukungan politik dari Komisi V DPR RI sebagai komisi yang membidangi infrastruktur untuk kita bisa atasi bersama seluruh kendala atau hambatan yang kita temukan dalam waktu berjalan selama pengawasan Natal dan tahun baru.

Saya persilakan Pak Menteri Perhubungan.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (IR. BUDI KARYA SUMADI):

Terima kasih.
Pak Ketua Komisi V yang saya hormati dan saya banggakan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi,
Salam sejahtera,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya dan
Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan para Anggota DPR RI yang saya hormati,
Yang saya hormati Menteri PUPR yang diwakili oleh Dirjen Bina Marga,
Kepala BMKG,
Kepala Basarnas,
Kakorlantas yang diwakili oleh Brigjen Ery,
Rekan-rekan Direksi dari BUMN dan operator, dan hadirin yang berbahagia,

Nah, tentu kita memanjatkan puji syukur pada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, bahwa kita bisa bertemu. Dan saya senang sekali bahwa kita secara bersama-sama melakukan Rapat Kerja, melakukan evaluasi terhadap angkutan Natal dan tahun baru 2023. Karena ini ada akan menjadi modal bagi kita untuk persiapan lebaran yang akan datang, dimana mudik lebaran akan lebih signifikan.

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan para Anggota,

Saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi V dan seluruh *stakeholder* yang telah melakukan sinergi dan kolaborasi, dan itu menjadi modal bagi kita mudik pada Nataru 2023 itu relatif berjalan lancar, aman, dan terkendali. Kita memang melihat bahwa angkutan Nataru 2023 ini lancar, aman dan selamat dan kami melakukan itu adalah merujuk dari Satgas Covid ya, jadi ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Ada juga Kemendagri yang harus kita penuhi dan kami lalu mempersiapkan prasarana dan sarana dan melakukan sosialisasi. Tapi tidak lupa kami juga melakukan *ram check* untuk memastikan, bahwa sarana transportasi itu berjalan dengan baik dan bisa memenuhi fungsi-fungsi konektivitas dengan baik dan masih menerapkan Prokes ketat yang, yang ada terutama di udara dan di kereta api.

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V yang saya banggakan,

Posko kita buka mulai 19 Desember sampai 3 Januari, dan secara resmi 4 Januari kita tutup. Di situlah kita melakukan koordinasi semua instansi, di mana semua instansi ada di Posko, di Kementerian Perhubungan, tapi karena memang domain daripada angkutan Natal ini, terutama ada di darat, dan itu dilakukan oleh Polisi atau Kakorlantas. Saya juga berkesempatan mendatangi pos Kakorlantas yang secara *perfect* membuat satu koordinasi, informasi berkaitan dengan apa yang terjadi seluruh provinsi di Indonesia.

Pak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan para Anggota,

Kita juga mencatat, bahwa ada peningkatan yang cukup besar, hari Nataru dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 73%. Dan ini kereta api yang paling banyak adalah 68%, udara relatif stagnan, penyeberangan itu ada kenaikan dan laut juga ada kenaikan, tapi tidak terlalu besar.

Bapak-Ibu sekalian,

Kita juga melihat bahwa saat itu transportasi paling banyak digunakan masa itu adalah angkutan udara justru 31% dan jalan sebanyak 25%, angkutan kereta api dan penyeberangan sebanyak 11% dan 8%. Lalu kami laporkan juga bahwa ada beberapa titik-titik simpul yang tertinggi ya, itu di terminal Kertonegoro di Jawa Timur, lalu di Tirtonadi, lalu Soekarno di Jawa Tengah dan penyeberangan tentu Merak paling banyak, sebanyak 648.000 dan Bakauheni 588.000 dan Gilimanuk sebanyak 420.000.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Bandara tertinggi terdapat Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai serta Juanda, ini tiga bandara yang menjadi asal dan tujuan para pemudik dan di tiga titik itu praktis tidak terhadap suatu hal yang signifikan berkaitan dengan pelayanan. Sedangkan DAOP, ya tentu Jakarta paling besar, lalu Jogja dan Surabaya. Ini memang menjadi satu tradisi, bahwa 3 DAOP ini selalu menjadi suatu favorit bagi pergerakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahkan terdapat suatu *shifting* ya dari angkutan udara, sebagian ke angkutan kereta api.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Kalau laut itu justru yang paling banyak di Batam dan Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Perak, karena di situ banyak saudara-saudara kita yang dari Batam ingin ke Medan, ke Riau dan sebagainya. Lalu kami juga harus *realize*, bahwa evaluasi pada akhir tahun kemarin adalah terutama berkait dengan cuaca buruk. Beberapa hal yang signifikan terjadi karena cuaca buruk, terjadi penghentian sementara di Merak dan Bakauheni, juga beberapa antrian yang agak panjang karena laut tidak begitu bersahabat, sehingga pergerakan itu kita batasi dan memang ada satu penumpukan, tapi kita bisa atasi dengan baik.

Sektor yang perlu penanganan lainnya adalah adanya *rob* di Semarang khususnya. Kita sebenarnya sudah koordinasi dengan BMKG dan *stakeholder* untuk melakukan rekayasa hujan buatan, tetapi karena curah hujan yang begitu tinggi, sehingga di Semarang kita *gak* sempat untuk melakukan, tetapi di Jakarta, di Jawa Barat, itu relatif bisa terkendali dan tidak terjadi suatu penumpukan yang berarti.

Kita juga mengalami masalah di Karimun Jawa, karena tingginya gelombang, sehingga ada beberapa wisatawan yang terjebak, dan kami menginstruksikan Pelni melakukan suatu penyelamatan dan tercatat kapal Kalimutu itu bersandar dan lalu mengangkut ke Semarang dan berjalan dengan baik.

Dalam segi penerbangan, tentu ini berakibat pada *on time performance*, karena khusus di Semarang berarti itu tidak bisa didarati, sehingga rotasi pada pesawat itu tidak bisa maksimal dan mengakibatkan *on time performance* secara menyeluruh relatif menurun. Jadi, pada saat Nataru kemarin, Pak Ketua, memang cuaca ekstrem menjadi satu kendala. Pada Desember kemarin memang ada suatu anomali, nanti mungkin Ibu Ketua BMKG menjelaskan. Namun demikian, ini tetap menjadi pelajaran kita, kalau nanti lebaran *Insyallah* cuaca ekstrem itu tidak terjadi, sehingga kita akan berkonsentrasi melakukan suatu pengendalian dari sisi-sisi yang lain.

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan para Anggota DPR yang saya hormati,

Kita dapat mengatakan relatif lancar, walaupun terdapat beberapa kekurangan-kekurangan dan semua itu tidak lain karena dukungan dari Bapak-Ibu sekalian, para Anggota Komisi V dan para Pimpinan, dan saya harus berterima kasih pada *stakeholder* yang sangat kompak untuk melakukan sinkronisasi, kita mulai dari rapat dengan Kementerian PMK, lalu ada Rakor, setelah itu kita bagi tugas secara *policies* itu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, tetapi dalam hal pelaksanaan, terutama di darat, kami minta kepada Kakorlantas untuk melaksanakan. Selain itu, ya *alhamdulillah*, Basarnas tidak banyak bekerja, *alhamdulillah* karena apa yang terjadi pada cuaca ekstrem tidak menimbulkan suatu hal yang signifikan.

Nah, oleh karenanya, kita menyadari perlu penyempurnaan untuk melakukan sinkronisasi untuk melakukan survei, menghitung cuti bersama pada saat waktu libur nanti pada saat lebaran, sosialisasi kebijakan ini penting, dan kami beruntung didukung oleh media massa secara lugas, sehingga apabila ada hal yang penting seperti terjadi di Merak maupun di Semarang, informasi yang kita sampaikan itu cukup mendapatkan respons dari media dan disebarkan ke seluruh masyarakat dan itu sangat membantu.

Bapak-Ibu sekalian,

Kita memang melakukan survei, *alhamdulillah* mendapatkan suatu

tingkat kepuasan yang baik, tapi saya pikir tidak cukup dengan itu, karena kita justru melihat hal yang menjadi suatu perlu kita perbaiki, banyak sekali. Dan mungkin Bapak-Ibu sekalian, yang banyak hal-hal yang tidak terpantau dari pusat ini silakan menyampaikan karena apa yang Bapak-Ibu sampaikan itu bisa modal kita semuanya untuk memperbaiki layanan konektivitas pada saat lebaran.

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan para Anggota,

Saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Menteri.

Sebelum ke yang lain Pak Menteri, kami masih mendapat laporan untuk Pansela itu Faskesnya ya, fasilitas keselamatan jalannya masih perlu kita tingkatkan dalam rangka kita menghadapi nanti Natal apa lebaran. Ini kondisi jalan sudah cukup bagus, tapi dari kabupaten-kabupaten pantai selatan ini, kita masih banyak mendapat laporan, Pak, terkait dengan Faskes ini.

Mohon izin, Pak Menteri kalau masih memungkinkan, kita bisa kejar untuk menjelang lebaran yang akan datang. Mungkin perlu sedikit disampaikan kami, Pak, *progress* terakhir penanganan Pansela ini.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (IR. BUDI KARYA SUMADI):

Baik, Pak.

Pansela menjadi perhatian kita, oleh karenanya, Kakorlantas bersama Dirjen Darat menyusur sampai ke, dari Banten, Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah, ya. *Nah*, maaf Pak Dirjen, masih terdapat penggalan-penggalan yang belum baik, sehingga kami rekomendasikan, kita tidak terlalu men-*campaign* Pansela, tapi nanti mungkin secara informal dari Kakorlantas dan Dirjen darat bisa sampaikan. Saya informal sudah bicara Pak Dirjen, jadi kita memang ada penggalan-penggalan yang bisa berfungsi secara sempurna, ada penggalan-penggalan yang masih kecil, nanti kami izin akan koordinasi dengan PU, mungkin bisa kita lakukan perbaikan.

Yang signifikan Pak Ketua, kami kerja sama dengan PU, karena salah satu hal yang paling krusial itu di saat lebaran itu adalah jalan tol. Kemarin kami rapat dengan Menteri PUPR untuk menambah *rest area*, Pak, *rest area*, *rest area* di arah ke Merak dan juga ke arah Jawa Timur. Jadi, maaf Pak Dirjen, nanti saya minta Pak Dirjen Darat memberikan informasi, di mana titik-titik yang memang harus perbaikan, tetapi seperti saran Pak Ketua, kami akan

melengkapi ada parsel-parcel yang memang sudah baik.

Nah, nanti bahkan mungkin kita bisa informasikan pada sebelum lebaran mana yang bisa berjalan menjadi substitusi dari pergerakan angkutandari Jawa Barat ke Timur maupun sebaliknya. Kami akan laporkan secara khusus kepada Komisi V dan nanti secara khusus saya juga minta Dirjen Darat dan Korlantas melaporkan ke Komisi V, dan kami izin untuk koordinasi, tapi *Insy Allah* karena ini memang tempat-tempat yang tidak memungkinkan itu tanjakannya luar biasa, Pak. Jadi *costly* dan mungkin juga menjadi satu perhatian bagi kita, tapi mungkin lebaran nanti mungkin beberapa yang signifikan.

Saya usulkan terutama dari Jawa Barat ke Jawa Tengah itu ada beberapa titik-titik yang harus diperbaiki, kita akan koordinasikan. Saya sudah bicara Pak Menteri PUPR, Pak Dirjen sudah saya sampaikan juga, tapi saya pikir ya, kita mesti *improve*, Pak. Seperti halnya juga, *rest area* ini juga satu pantauan. Jadi secara khusus Kakorlantas Pak Dirjen Darat jalan. Saya *gak* sempet ikut, tapi dari PU juga hadir. Tapi Pak Ketua beberapa tempat yang akan diberikan penanganan kita arahkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Terima kasih, Pak Menteri.

Inikan diskusi kita yang lama soal Pansela ini, Pansela ini sudah kita bangun ya, sudah banyak menghabiskan APBN kita di sana. Kemudian mungkin, ya kalau dari sisi kita membangun kan pekerjaan sekarang, minor ya Pak Dirjen, ya, mayoritas sudah selesai, Pak. Pekerjaan beratnya sudah selesai, pekerjaan utamanya udah selesaikan, pekerjaan utamanya sudah selesai kan?

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. HEDY RAHADIAN, M.SC.):

Pak, sedikit Pak.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ya.

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. HEDY RAHADIAN, M.SC.):

Mungkin sedikit, Pak.

Memang kita ada isu-isu, yang pertama terkait dengan penerangan jalan dan marka jalan, dan itu kami dengan Perhubungan, dengan Korlantas sudah mengidentifikasi itu, bahkan kita sudah ada keluar kebutuhan biayanya mencapai kira-kira kalau kita lengkapi semua itu sekitar 1 triliun, Pak. Jadi bukan biaya yang murah juga. Jadi mungkin nanti kita ada prioritas.

Kemudian yang kedua, isu yang kedua adalah ada berapa segmen yang memang geometriknnya sangat substandar. Misalnya di sekitar Ayah- Jladri yang memang solusinya adalah kita bangun jalan alternatif dan itu masih kita kaji karena biayanya cukup besar, untuk daerah yang berbukit- bukit di situ. Jadi, rencana kita adalah Ayah-Jladri dan juga ada di sana, jalan lama, Jalan Daendels, kita akan perbaiki, mungkin dengan Inpres jalan daerah itu, Pak, memang statusnya masih jalan daerah.

Kemudian ada beberapa kerusakan umpamanya di sekitar Tegal-
buleud itu, ada sekitar 10 kilometer, kita sudah programkan dan mungkin yang baru kita bangun itu adalah ujungnya sekarang ini kira-kira sampai Sendangbiru di Selatannya Malang, Pak. Jadi Sendangbiru ke Banyuwangi, mungkin di tahap berikutnya, walaupun itu ada jalan alternatif sebenarnya untuk agak ke tengah, *gitu*, tapi yang Panselanya memang belum dibangun, itu mungkin yang bisa kami laporkan.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Sepertinya PR Pansela ini harus kita cepat tuntaskan ini Pak, Pak Dirjen, karena ada korelasi, kemacetan menimbulkan kelelahan itu ada korelasi dengan tingkat kecelakaan, itu harus selalu kita bicarakan ya Pak Kakorlantas ya, atau yang mewakili. Biasa kelelahan orang di jalan itu ada korelasi, Pak, dengan tingkat kecelakaan, mungkin semakin lancarnya arus lalu lintas, banyak alternatif yang bisa dilalui, ini akan mengurangi tingkat kecelakaan, karena pada akhirnya ujung ceritanya adalah penurunan angka kecelakaan yang mau kita kejar, Pak, ya. Ini yang barangkali, maka kami meng-*concern*-kan perhatian kepada Pansela sebagai jalur pemecah untuk mengurangi beban di utara dan Jalan Tol.

Baik.

Sebelum kita perpanjang ya, nanti mungkin kita di pendalaman.

Kami persilakan sekarang dari Kakorlantas dulu biar nyambung. Silakan Pak, yang mewakili Kakorlantas, Pak Ery.

**DIREKTUR KEAMANAN DAN KESELAMATAN KORLANTAS POLRI
(BRIGJEN. POL. DRS. ERY NURSATARI, M.H.):**

Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi,
Salam sejahtera,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Ketua Komisi V dan Bapak Wakil beserta Anggota DPR RI yang saya banggakan,
Yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan,
Menteri PUPR dalam hal ini diwakili oleh Pak Dirjen,
Kepala Basarnas,
Kepala BNPB,
BMKG, dan
Undangan sekalian baik yang virtual,

Pertama-tama, kami mengucapkan permohonan maaf pada Bapak Ketua, seyogyanya Pak Kakorlantas akan hadir, namun ada tugas yang sudah terjadwal.

Selanjutnya, pada kesempatan ini, kami ingin sedikit memaparkan tentang analisa dan evaluasi Operasi Lilin yang kita laksanakan tahun 2022, bahwa *alhamdulillah* berkat kerjasama yang baik, maupun dari pengawasan Bapak Ketua Komisi V, kami bisa melaksanakan pengamanan Natal dan tahun baru berjalan dengan aman dan tertib dan lancar. Kita ketahui bersama bahwa di dalam operasi kemarin kita melibatkan personel sampai 166.791 personel, dimana terdiri dari Anggota Polri sendiri sebanyak 100.000 sekian personel dan instansi terkait. Kemudian kami juga mendirikan atau melaksanakan beberapa Pospam, yaitu pos pengamanan, Pos Pelayanan dan pos terpadu, ada 1.868 dan posnya sebanyak 709 lokasi dan pos terpadu 70 lokasi.

Objek pengamanan, karena ini kaitan dengan Natal dan tahun baru ada sebanyak 52.636 lokasi yang kami amankan beserta jajaran, di mana gereja sebanyak 41.702, terminal 711, pelabuhan 653, bandara 206, dan stasiun kereta api, pusat perbelanjaan dan objek-objek pergantian tahun sebanyak 1.706 lokasi. Disampaikan juga bahwa selama 11 hari Operasi Lilin telah terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 3.067 kejadian di tahun 2002, naik 11% dibanding tahun 2019. Kami laksanakan perbandingan di tahun 2019, karena memang pada saat sebelum pandemi. Jadi di tahun 2019 sebanyak 2.764 kejadian.

Selanjutnya korban meninggal dunia turun sebanyak 40% dari 731 jiwa

di tahun 2019 menjadi 431 jiwa di tahun 2022. Sedangkan korban luka berat sebanyak, turun sebanyak 19% dari 352 jiwa di tahun 2019, 2019 dan menjadi 285 di tahun 2022. Selanjutnya korban luka ringan turun juga sebanyak 5% dari 3.413 korban di tahun 2019 menjadi 320. 242 korban di tahun 2022. Perlu kami sampaikan juga untuk kerugian materil dampak dari kecelakaan lalu lintas turun sebanyak 8% dari 5 miliar 700 sekian 737 juta menjadi 5 miliar 276 juta sekian. Kami sampaikan juga kepada Bapak Ketua, anatomi kecelakaan di dalam pelaksanaan Operasi Lilin. Berdasarkan jenis kecelakaan, lalulintas masih didominasi kecelakaan tunggal sebanyak 672 kejadian, disusul oleh kecelakaan lalu lintas depan dan belakang sebanyak 623 kejadian sedangkan terbesar ketiga, yaitu kecelakaan dari depan-depan, depan dengan depan sebanyak 613.

Berdasarkan fungsi jalan bahwa kecelakaan lalu lintas banyak terjadi pada ruas jalan arteri sebanyak 1.157 kejadian. Berdasarkan profesi, korban yang terbanyak adalah profesi lain-lain, di antaranya tidak bekerja, ibu rumah tangga, petani, dan pensiunan sebanyak 1.573, disusul dengan profesi karyawan atau swasta sebanyak 1.307. Sedangkan untuk mahasiswa pelajar sebanyak 917. Kami sampai juga kepada Bapak Ketua, terdapat juga profesi korban dan pengemudi di antaranya TNI, PNS, Polri namun jumlah sedikit tidak terlalu banyak.

Berdasarkan profesi pelaku, jumlah terbanyak masih didominasi profesi lain-lain, yaitu tidak bekerja, ibu rumah tangga, petani, pensiun sebanyak 683, disusul karyawan swasta sebanyak 609, selanjutnya mahasiswa, pelajar 342, disamping itu juga terdapat profesi pelaku PNS, pengemudi, TNI, Polri yang jumlahnya tidak terlalu banyak atau sedikit. Berdasar kendaraan bermotor yang terlibat masing-masing masih didominasi kendaraan sepeda motor atau roda dua sebanyak 2.486, disusul oleh kendaraan mobil barang sebanyak 354 kendaraan, bus sebanyak 231 dan kendaraan mobil penumpang sebanyak 159 sedangkan kendaraan tidak bermotor atau sepeda sebanyak 117.

Selanjutnya, perlu kami sampaikan jumlah penindakan pada saat Operasi Lilin mengalami kenaikan sebanyak 34%, yaitu 94.434 pelanggar di tahun 2019 menjadi 143.673 pelanggar di tahun 2022. Pada penindakan pelanggaran lalu lintas, kami membagi dua penindakan, yaitu dengan menggunakan elektronik tilang sebesar 37% atau 9.787 pelanggar di tahun 2019 dan 15.579 pelangan di tahun 2022. Sedangkan penindakan teguran dan tertulis naik sebanyak 34% dari 48.600 di tahun 2019 menjadi 1.000, eh 128.094 pelanggar di tahun 2022.

Selanjutnya, kami sampaikan, bahwa volume arus lalu lintas di tahun 2022, masyarakat masih banyak menggunakan ruas tol untuk kendaraan yang keluar dan masuk ke Jakarta dari 4 tol gerbang utama, yaitu Cikampek Utama, Kalihurip utama, Ciawi utama, Cikupa utama. Yang terbanyak ke luar Jakarta, yaitu terjadi di tanggal 23 Desember tahun 2022 melalui gerbang Cikampek utama sebanyak 55.346 kendaraan.

Kami sampaikan juga bahwa kendaraan yang masuk ke Jakarta selama Operasi Lilin tahun 2022 sebanyak 59.262 kendaraan, yaitu pada tanggal 1 Januari. Dari hasil data tersebut, kami sampaikan bahwa prediksi arus berangkat dan kembali, itu sudah sesuai dengan prediksi kita bersama dengan *stakeholder* lainnya, yaitu tanggal 23 Desember dan tanggal 1 Januari.

Perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ketua, selama Operasi Lilin terjadi 2 kejadian kecelakaan menonjol yang terjadi pertama di Aceh Pidie, tanggal 30 Desember 2022 antara kendaraan truk pengangkut CPO dengan kendaraan penumpang jenis sedan Honda Jazz, TKP di Jalan Banda Aceh Medan, tepatnya di Gampong Simpang Betung, Kecamatan Muara Tiga dengan korban meninggal sebanyak 6 orang dan luka berat sebanyak 2 orang dan kerugian materil sebanyak Rp110.000.000,00.

Kemudian di Pasuruan Jawa Timur, kendaraan sepeda motor tertabrak kereta api Tawangalun yang melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang terjadi pada tanggal 31 Desember, dengan korban meninggal dunia sebanyak 5 orang dan kerugian materil sebanyak Rp15.000.000,00.

Kami juga mencatat ada dua kejadian di Pelabuhan Merak pada Operasi Lilin, ada satu kendaraan penumpang tercebur di dermaga dua Merak, tanggal 23 Desember, pada saat proses muat penumpang di kapal motor salem, korban dapat diselamatkan. Namun demikian, kerugian materil sebanyak Rp150.000.000,00. Kendaraan truk pengangkut semen tercebur di dermaga tanggal 28 Desember 2022, tidak ada korban jiwa, adapun kerugian materil sebanyak Rp468.750.000,00.

Selanjutnya, kami sampaikan juga pelaksanaan rekayasa lalu lintas yang dilakukan selama Operasi Lilin tahun 2022. Untuk jalur tol telah dilaksanakan cara bertindak *contra flow*, baik yang ada di ruas tol Jakarta-Cikampek maupun ruas tol Cikampek-Palimanan. Untuk jalur wisata, baik yang ada di Lembang maupun yang di Puncak dilaksanakan dengan cara *oneway* atau satu arah, sepenggal.

Mohon izin juga, kami laporkan kepada Bapak Ketua, bahwa kita Korlantas, Kementerian PUPR, kemudian Dirjen Kementerian PUPR dengan Kementerian Perhubungan, bersama Jasa Raharja sudah mendahului kemarin melaksanakan survei di Pansela dan jalur utara. Kita memang melaksanakan jauh-jauh hari untuk mempersiapkan sekaligus melihat sampai sejauh mana kesiapan pantai selatan maupun pantai utara yang digunakan pelaksanaan Operasi Ketupat tahun 2023, baik arus balik maupun mudik.

Kami sampaikan kepada Bapak Ketua maupun Bapak Menteri pada Menteri Perhubungan bahwa hasil survei ruas pantai selatan secara keseluruhan, jalan sudah dapat dilalui oleh para pemudik. Namun, masih ada sedikit ruas jalan yang perlu rekonstruksi ringan, termasuk dengan mempersiapkan penerangan jalan umum, termasuk juga yang dijelaskan oleh Pak Dirjen tadi, Pak, ya, banyak gunung-gunung yang memang harus

diperhatikan lagi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Menteri PUPR, Perhubungan bahwa memang betul ruas pantai selatan memiliki pemandangan yang sangat bagus sekali. Semoga ini menjadi daya tarik tersendiri masyarakat yang akan mudik dan balik sesuai jalan pantai selatan, namun ini juga harus waktunya panjang karena memang cukup memakan waktu dibanding melalui jalur-jalur tol dan lainnya.

Sedangkan, pada arus jalan pantai utara, masih terdapat hambatan akibat dari perbaikan beberapa jembatan, baik yang ada di Provinsi Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Semoga ini dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan Operasi Ketupat. Kemarin secara langsung, Bapak Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR, dengan Kementerian Perhubungan, dan kami Jasa Raharja, Pak Dirjen telah memberikan arahan dan menentukan waktu target pengerjaan, namun ada satu jembatan, yaitu jembatan Pemali di Kabupaten Brebes, yang menurut kontraktor maupun pengawas tidak dapat terselesaikan pada Operasi Ketupat 2023. Namun demikian, kemarin pada saat di lokasi jembatan Pemali, kami langsung bertemu dengan Dirlantas Polda Jateng dan Kapolres untuk mengatur, sudah coba bisa mengatur tentang manajemen rekayasa lalu lintas yang akan digunakan, yaitu arus lalu lintas nanti akan diputar melalui jalur lingkaran utara.

Kami juga melakukan survei akan melakukan survei di jalur tol Jakarta-Surabaya, tol fungsional Cisumdawu, tol fungsional Japek II selatan, termasuk juga akan melakukan survei jalan ke Pelabuhan Merak Ciwandan.

Dan terakhir kami akan melakukan survei ke jalur Puncak Wisata Bogor. Dan harapan survei yang kami lakukan, tentunya kami dari Korlantas, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dapat mengetahui kekurangan dan kesiapan semua jalur yang akan dilalui pada saat arus mudik dan arus balik lebaran 2023, sehingga kami membuat perencanaan manajemen rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan.

Tentunya hal ini kami juga mengharapkan dukungan dari Ketua dan Anggota Komisi V. Semoga ini bisa berjalan dengan baik dan kami akan bekerja maksimal untuk melayani masyarakat di dalam menyambut lebaran tahun 2023 dengan Operasi Ketupat, operasi kemanusiaan.

Sekian dan terima kasih.

Selanjutnya kami memasukkan arahan penyempurnaan serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Mohon maaf.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Brigjen Pol Drs. Ery.

Sebelum ke BMKG dan Basarnas, kita kan kemarin mau revisi lalu lintas dan angkutan jalan Pak Menteri, Pak Menteri Perhubungan. Kemudian, keputusan, kesimpulannya, kesimpulan yang diambil oleh DPR adalah menyerahkan kepada pemerintah untuk sebagai menginisiasinya. *Nah*, jadi itu kesimpulan kemarin di Baleg ya, Pak ya, di Baleg, Bamus. Baleg dan Bamus ya, Bamus kembali ke Baleg, menyepakati seluruh fraksi-fraksi di sana setuju direvisi, tetapi inisiatif dari pemerintah ya. Ini ada banyak persoalan kita di lalu lintas dan angkutan jalan, kebetulan ini hadir semua, Pak Korlantas, kemudian Kementerian Perhubungan, apa namanya, kekosongan hukum yang terjadi ini kalau *nggak* cepat kitaantisipasi, menurut saya *nggak* baik. Saya beberapa waktu yang lalu, Pak Menteri, berdiskusi dengan angkutan *online*. Saya tanya kepada angkutan *online*, bagaimana anda mengontrol kendaraan anda yang hari ini statusnya dalam tanda kutip abu-abu menjadi angkutan umum.

Pertanyaan saya yang kedua bagaimana anda mengontrol pengemudi, apakah dia sehat Jiwa dan raga? sehat jasmani dan rohani? adakah mekanismenya? Dua pertanyaan itu tidak terjawab Pak Ery dan Pak Menteri Perhubungan, tidak bisa dijawab oleh aplikator. Sementara hari ini, kita harus mengakui, ini angkutan umum ini ya, mengangkut orang berbayar dan sah, tarif dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Pertanyaan saya mau sampai kapan ini kita biarkan seperti ini. Oleh karenanya, karena keputusan politiknya kami kemarin di DPR ini meminta pemerintah yang menjadi inisiatornya untuk melakukan revisi ini. Ya, sudah kami ikut saja.

Oleh karenanya, kami berharap kalau pemerintah cepat mendorong ini untuk dilakukan revisi, tentu kami DPR menunggu saja, manakala tidak, mau tidak mau mungkin kami akan menyusun langkah-langkah lagi untuk mendorong untuk segera ini dilakukan revisi. Berapa orang yang meninggal setiap hari karena pengemudinya tidak sehat? berapa orang yang kecelakaan setiap hari, bahkan mungkin sampai meninggal juga karena kendaraannya tidak sehat? tidak ada yang bertanggung jawab, dia mau sehat mau narik, narik aja, tinggal masuk di aplikasi. *Lah, kok* sehat *nggak* bisa pakai aplikasi, saya tanya, ada *nggak* aplikasi yang menyatakan orang sehat, *nggak* sehat? Wah, itu sangat sulit untuk kita kejar, Pak, itu. Oleh karenanya, bagian terpenting sebetulnya yang mau kita lakukan revisi itu adalah di situ, ya. Ini sudah melibatkan, saya tanya, ada berapa banyak sekarang orang yangterlibat di dalam angkutan *online* ini, pengemudi tercatat itu 2.000.000 lebih Pak, 2.000.000 lebih, berarti ada 2.000.000 lebih kemungkinan kalau orangnya tidak sehat, kalau kendaraannya tidak sehat. Saya rasa itu.

Selanjutnya, singkat saja Ibu Kepala BMKG dan Kepala Basarnas, dimulai dari BMKG dulu. Singkat saja, Bu. Ini kita konteksnya di seputar Nataru saja. Ya, terima kasih, Bu.

**KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA RI
(PROF. IR. DWIKORITA KARNAWATI, M.SC., PH.D.):**

Terima kasih, mohon ditayangkan.

Jadi, yang kami jaga saat itu karena terdeteksi pada sekitar tanggal 20 adanya potensi ekstrem yang super *impose* dari beberapa fenomena, yaitu masuknya seruak udara dingin dari Dataran Tinggi Tibet, kemudian Bergeraknya awan-awan dari Timur Afrika melintasi Kepulauan Indonesia, kemudian juga munculnya beberapa bibit siklon, semua itu terjadi bersamaan, sehingga dikhawatirkan *impact*-nya itu menjadi ekstrem, bahkan lebih dari ekstrem. Oleh karena itu, kami berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan PUPR, BNPB melakukan teknologi modifikasi cuaca. Bagaimana memaksa tadi dampak dari fenomena itu, banyaknya kumpulan awan-awan yang dengan modifikasi cuaca dipaksa untuk jatuh ke laut, tidak jatuh ke darat.

Nah, jadi poinnya itu selain juga menyebarluaskan peringatan dini selama berkali-kali dalam setiap harinya, terutama untuk penyeberangan untuk di laut agar tidak terjadi kecelakaan laut. Jadi utamanya tersebut dan *alhamdulillah*, malam tahun baru yang harusnya hujan ekstrem di kawasan Jabodetabek itu bisa dicegah karena apa, awan-awan tadi sudah diturunkan, juga di Jawa Barat di tol Cipali. Namun, kami tidak berhasil di Jawa Tengah dan di Sulawesi karena kekurangan pesawat. *Nah*, jadi utamanya hal tersebut dan *Insy Allah* saat lebaran nanti, kondisi ekstrem ini sudah berkurang.

Untuk menutup laporan ini, mohon perkenan kami memutar satu video pendek, saya persilakan, ini video pendek bagaimana kami berupaya untuk menjaga agar Nataru bisa aman dan lancar.

Terima kasih.

Saya persilakan untuk penutup.

(PENAYANGAN VIDEO OLEH BMKG RI)

Terima kasih.

Jadi itulah apa yang kami lakukan meskipun belum berhasil 100% karena kekurangan pesawat. Terima kasih. Mohon Arahan lanjut.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Terima kasih, Bu Kepala BMKG.

Berarti kita sudah bisa melokalisir hujan, Bu, ya. Kalau makin banyak hujan yang bisa kita pindahkan, kelihatannya kita *nggak* usah, *kayaknya* bisa mengurangi banyak pekerjaan Pak Ery ini, Kepala Basarnas nih, Pak, ya. Jadi saya pingin dalam ilmu ini, Pak. Saya belum bisa bicara banyak dulu, takutnya nanti butuh biaya besar pula, ujung-ujung ceritanya kan. *Nah*,

sementara anggarannya terbatas.

Silakan Pak kepala Basarnas.

KEPALA BNPP/BASARNAS RI (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI, M.HAN.):

Terima kasih waktunya yang diberikan.

Yang terhormat Ketua Komisi V DPR RI selaku pimpinan rapat,
Yang saya hormati para Wakil Ketua dan para Anggota Komisi V DPR
RI,

Yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan,
Kemudian Kepala Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika,
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dalam hal ini diwakili
oleh Pak Sekjenya,
Kemudian Kepala Korps Lalu Lintas atau yang mewakili, serta
Hadirin yang berbahagia.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.*

Terima kasih, Bapak atas waktunya.

Kami langsung saja, Pak, untuk melaporkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Basarnas dalam siaga Nataru 2022/2023. Pada pelaksanaan siaga secara khusus, libur Natal 2022 dan tahun baru, Basarnas mendirikan sebanyak 428 lokasi posko dan pemantauan, terdiri dari 255 posko gabungan dan 173 posko *mobile* untuk mengantisipasi kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia dan mengantisipasi kondisi kedaulatan di laut. Basarnas menyiapkan, menyiagakan 209 unit kapal dan juga 3 helikopter. 3 helikopter ini kami tempatkan di Pelabuhan Merak, Bakauheni, Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, dan Lanud Atang Sanjaya.

Bapak Ketua,
Para Wakil Ketua dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Berikut akan kami laporkan hasil pelaksanaan Operasi SAR siaga SAR di tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut.

Total operasi SAR, yaitu sebanyak 129 operasi dengan rincian laka pesawat udara nihil, *alhamdulillah*, laka kapal sebanyak 57, laka dengan penanganan khusus 2 kejadian, bencana alam 12 kejadian, dan kondisi membahayakan manusia sebanyak 58 kejadian wilayah. Kemudian wilayah dengan frekuensi operasi SAR tertinggi ada di Kantor SAR Surabaya sebanyak 15 operasi SAR, atau SAR Semarang 12 operasi SAR, dan Kantor

SAR Makassar sebanyak 7 Operasi SAR.

Jika dibandingkan dengan total operasi SAR pada Nataru '21, '22, sebanyak 144, data tersebut menunjukkan terjadi penurunan presentasi jumlah operasi SAR sebanyak 10,41%. Walaupun di tahun 2023 saat ini, kita diberi kebebasan untuk melaksanakan Nataru. Namun, kejadiannya terjadi penurunan, total korban pada Nataru kali ini sebanyak 1.609 orang, ini data yang ditangani oleh Basarnas.

Kemudian di tahun 2021-2022 sebanyak 1.510 orang, catatan semua menunjukkan kenaikan korban terdampak sebesar 6,55%. Namun demikian, prosentase korban selamat, naik sebesar 10,69%, korban meninggal dunia turun 24,76% dan korban hilang 52,5%, bisa ditampilkan, bisa dilihat di *slide*. Meskipun ada tren kenaikan jumlah korban akibat meningkatnya aktivitas masyarakat setelah pelonggaran PPKM, persentase korban selamat meningkat, jumlah korban meninggal dan korban hilang mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Penyebab tren penurunan jumlah operasi SAR karena adanya kebijakan dari Basarnas, di mana seluruh kantor SAR agar secara proaktif berkoordinasi dengan BMKG, otoritas pelabuhan dan juga mengelola pariwisata untuk memonitor dan memperingatkan secara langsung kepada pemilik kapal agar penumpang yang diangkut tidak melebihi atau *overload*, dan melebihi persediaan alat keselamatan. Hal ini menyebabkan meningkatnya kepatuhan para pemilik kapal ini. Kami jemput bola Bapak-Ibu sekalian, kami juga memberikan *warning* kepada para pemilik kapal dan juga berkoordinasi dengan ASDP, sehingga kita bisa meminimalisir kejadian kecelakaan, utamanya laut dengan sebaik mungkin.

Respons time untuk Nataru kali ini, rata-rata sebesar 16,25 menit, meningkat sebesar 5,25% dibanding tahun lalu yaitu 17,15 unit. Pencapaian ini, memenuhi target waktu *respons time* yang telah ditetapkan, yaitu 25menit. Kami laporkan, bahwa *respons time* ini merupakan salah satu indikator kinerja dari Basarnas demi memberikan layanan SAR kepada masyarakat karena kecepatan tanggap terhadap kondisi darurat menentukan keberhasilan dan keselamatan korban kecelakaan maupun bencana.

Bapak Ketua,
Para Wakil Ketua dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Selama pelaksanaan SAR Khusus, Natal 2022-2023, terdapat beberapa operasi SAR yang menjadi perhentian, yaitu terhadap operasi evakuasi wisatawan yang terjadi di Pulau Karimunjawa, ada kejadiannya ada 451 WNI dan 49 WNA. Kami tidak mampu, Pak, kapal SAR untuk mengevakuasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan bisa dievakuasi dengan KM Kalimutu. Sekali lagi, ini adalah keterbatasan kemampuan kapal kami yang ombaknya melampaui batas maksimum dari kapal Basarnas.

Kemudian kecelakaan Kapal KMP Mutiara, Pak, Ferindo IV patah as kemudi di Tidore, sebanyak 278 orang berhasil kita evakuasi. Kemudian kapal

Asman Indah 06 tenggelam di perairan Pulau Lambego, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Desember dari 11 penumpang, 5 orang diselamatkan, 6 orang dinyatakan hilang.

Terakhir ini bencana banjir yang terjadi di Sulawesi, tanggal 24, ini SAR gabungan telah berhasil melakukan evakuasi terhadap korban sebanyak 670 orang.

Bapak Ketua dan para Wakil Ketua, para Anggota Komisi V yang saya hormati,

Dari hasil pelaksanaan siaga SAR Nataru 2022/2023, kami dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Secara umum dapat kami laporkan pelaksanaan SAR khusus Nataru berjalan dengan baik, lancar karena sinergi Basarnas dengan kementerian dan lembaga terkait. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kementerian dan instansi yang terkait tersebut. Meskipun terdapat kenaikan korban, namun terjadi penurunan jumlah operasi SAR dan meningkatnya jumlah korban selamat. Meskipun *respons time* meningkat, namun kesiapan operasi laut belum maksimal dikarenakan keterbatasan jumlah ABK yang kita miliki, kemudian belum adanya kapal cepat yang mampu melampaui level 5 atau 3-4 meter. Oleh karena itu, yang kejadian di Karimun, Pulau Karimun, kami tidak bisa melakukan operasi tersebut.

Kemudian Operasi SAR didominasi oleh laka kapal, dengan ukuran di bawah 300 *gross ton* yang tidak dilengkapi dengan *Emergency Position Indicator Radio Beacon* (EPIRB), belum tersedia *helipad* yang cukup luas di Trans Jawa-Sumatra.

Dari kesimpulan di atas, kami menyarankan sebagai berikut: perlu perhatian dan pemantauan yang lebih intensif terhadap kapasitas penumpang kapal yang berlayar, terutama di pelabuhan-pelabuhan rakyat. Kapal di bawah 300 GT wajib dilengkapi dengan EPIRB, selama ini tidak disarankan, sehingga apabila mengalami kedaruratan dapat terdeteksi dengan cepat oleh LUT (*Locater User Terminal*) Basarnas, sehingga kita bisa memberikan layanan *search and rescue* dengan cepat. Perlu penambahan *helipad* dilokasi strategis yang rawan kecelakaan seperti di jalur tol. Dan terakhir perlu penambahan anggaran Basarnas untuk meningkatkan kemampuan kapal-kapal cepat dengan pembelian RBB (*Rigid Buoyancy Boat*) peningkatan jumlah ABK PNS dan pembangunan mess ABK di lokasi sandar dermaga kapal.

Demikian, yang saya hormati Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Komisi V yang saya hormati, laporan pelaksanaan siaga SAR 2022 2023. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI kepada Basarnas selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan

dan perlindungan bagi kita semua. *AkhirulKalam*, kami sampaikan

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Kepala Basarnas.

Terakhir dari Kementerian PUPR, melengkapi yang tadi sudah Pak Hedy sampaikan ini secara umum.

Saya persilakan Pak Hedy Rahadian mewakili Menteri PUPR.

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. HEDY RAHADIAN, M.SC.):

Baik.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang kami hormati, pimpinan dan Anggota Komisi V,
Yang kami hormati Bapak Menteri Perhubungan,
Ibu Kepala BMKG,
Bapak Ka. Basarnas,
Dirkamsel dari Korlantas,

Kami laporkan Pak Pimpinan, Kementerian PUPR tugasnya adalah mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan melalui penyediaan prasarana jalan dalam 3 hal, yaitu dukungan kondisi jalan untuk operasional dalam bentuk kemantapan jalan, tempat istirahat, kemudian dukungan operasional manajemen lalu lintas serta dukungan untuk kenyamanan pengguna jalan.

Kami laporkan kondisi operasional dan kemantapan jalan serta tempat istirahat dan pelayanan (TIP) di Pulau Jawa dan Bali, lintas utara itu, Pantura itu panjangnya 1.192 kilometer. Kondisi mantap 92%, ini kami laporkan mantap 90%, artinya ada sekitar 90 kilometer jalan yang kondisinya rusak. Kemudian lintas tengah ada sekitar 1.197 kilometer, mantap 95%, Selatan Jawa 888 kilometer, mantap 97%.

Kemudian tadi kita bicara Pansela cukup panjang 1.543 kilometer, ini jalan lintas, termasuk yang paling panjang Jawa dengan memang kondisi mantapnya 93%.

Adapun jalan tol yang operasional di Pulau Jawa ini ada 1.670 kilometer dengan 9 tempat istirahat berbagai tipe. Kemudian di Bali masih tetap kondisinya, Tol Bali-Mandara operasional 10 kilometer. Kemudian jaringan jalan nasional Pulau Bali sepanjang 363 kilometer dengan kondisi kemantapan yang cukup baik, yaitu 93,3%. Kami laporkan juga ada beberapa segmen ruas tol yang dibuka fungsional untuk mendukung Nataru ini.

Yang pertama adalah seksi 2 dan 3 Cisumdawu, itu panjangnya 21 kilometer, kemudian becakayu seksi 2A sepanjang 4,8 kilometer. Kemudian KLBM di Jawa Timur 7,4 kilometer, kemudian seksi 2 Semarang-Demak sepanjang 16,3 kilometer, kemudian Japek Selatan, ini fungsional juga, Sandang sampai Kutaneegara sekitar 8,5 kilometer. Kemudian Cijago (Cinere-Jagorawi) di Kukusan-Cinere kita buka sepanjang 3 kilometer fungsional dan di Bocimi seksi 2 Cigombong-Cibadak 11,9 kilometer. Pulau Sumatera yang nasional sepanjang 7.918 kilometer, yang kami laporkan kondisinya untuk Nataru lintas barat 2.500 kilometer, mantap 97%. Kemudian lintas timur 3.000 kilometer mantap 95%, jalan lintas tengah 2.338 kilometer, mantap 93%.

Adapun tol yang beroperasi di Sumatera, kami laporkan sepanjang 738 kilometer dengan 27 tempat istirahat berbagai tipe. Adapun yang khusus secara fungsional dibuka untuk Nataru adalah seksi 5 dan 6 jalan Tol Banda Aceh-Sigli sepanjang 12 kilometer dan Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat satu, sepanjang 20 kilometer. Di Kalimantan, kita memiliki jalan nasional sepanjang enam ribu lima ratus enam puluh enam puluh lima puluh enam kilometer dengan kondisi mantap 85,4% dan Tol Balsam (Balikpapan-Samarinda) sepanjang 97 kilometer. Ruas jalan nasional di Sulawesi sepanjang 17.284 kilometer, kondisi mantap 93,2%, jalan tol yang operasional sepanjang 61,5 kilometer.

Kemudian kita juga khusus dan sedang berlangsung juga sampai saat ini adalah peningkatan kualitas dan estetika di jalan tol.

Kemudian kami dalam operasional manajemen lalu lintas selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan Korlantas dan juga dengan BUJT dalam pelaksanaan mendukung kebijakan kelancaran lalu lintas. Yang pertama adalah pembatasan dan pengalihan kendaraan angkutan barang di jalan tol secara khusus, kemudian peningkatan kapasitas jalan dengan *contra flow*, *one way* atau buka tutup secara kondisional berdasarkan kondisi di lapangan.

Kemudian juga menjadi perhatian kita. Dan ini juga saya kira tadisudah disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan, fokus kita adalah tempat istirahat ya, terutama yang menuju arah Merak memang sedang kita upayakan di KM 97 dan juga ke arah timur ya, kita upayakan juga ada sedang

kita upayakan ada tambahan-tambahan *rest area* untuk mencegah adanya penumpukan kendaraan di bahu jalan karena kesulitan di *rest area*.

Kemudian kita juga mendukung penerapan Ferizy, yaitu sistem pembelian tiket *online* untuk tiket penyeberangan, untuk mempercepat transaksi tol kita dukung dengan operasi penuh gardu dan juga penyediaan *mobile reader*. Kami laporkan juga bahwa selama masa Nataru, kita hentikan semua kegiatan-kegiatan yang secara langsung mengganggu arus lalu lintas, dan juga kita siapkan pompa-pompa *mobile* di jalan-jalan tol, mengantisipasi kemungkinan adanya banjir ataupun genangan, juga kita sediakan aplikasi BPJT Info untuk pengguna jalan.

Untuk kenyamanan, kami laporkan juga bahwa di tempat istirahat kita terapkan *physical distancing*, memastikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 terlaksana dengan baik, juga kita memfasilitasi ketersediaan BBM modular di *rest area*, dan juga pengaturan buka tutup *rest area* pada saat kepadatan lalu lintas mencapai puncak.

Kemudian di jalanan tol, kita siapkan posko-posko siaga Sapta Taruna Natal 2022 dan tahun baru 2023. Ini tugasnya adalah khusus memastikan bahwa apabila ada kerusakan bisa cepat diatasi, walaupun secara darurat dan juga, apabila ada bencana, kita pastikan bahwa bencana itu segeratertangani, kita punya indikator bahwa setelah terjadi bencana, 6 jam tim sudah harus sampai di lokasi untuk penanganan. Kemudian kita lakukan juga penambahan toilet, mobil tanki kemudian juga hidran umum dan sejenisnya.

Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Pimpinan dan Anggota Komisi V, dan kita terus melakukan evaluasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyempurnaan dan untuk perbaikan pelayanan khususnya transportasi jalan di menghadapi lebaran di tahun ini.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Dirjen Bina Marga mewakili Menteri PUPR.

Pak Dirjen, sebelum ke pendalaman, tempo hari Komisi V ke Jambi, Pak, karena ada keluhan dari masyarakat di Jambi, terkait antrean kendaraan pengangkut batu bara, Pak Ery yang mewakili Kakorlantas, menimbulkan kemacetan yang luar biasa, Pak.

Di Undang-Undang Jalan, sebetulnya kalau tambang yang rutin seperti ini harusnya lewat jalan khusus Pak, tidak menggunakan jalan umum. *Nah*, letaknya di mana ini, penegakan hukum kami lihat *gak* jalan ya, Pak Dirjen sudah bikin jalan, Pak Menteri PU ya, Dirjen Bina Marga bangun jalan,

jalannya sudah bagus, itu dipergunakan untuk kepentingan umum, Pak, tidak untuk kepentingan khusus menurut Undang-Undang Jalan. Manakala ada kegiatan-kegiatan khusus, mereka harus bikin jalan sendiri. Pertanyaan kita, kenapa kegiatan khusus ini menggunakan jalan umum dan kita tidak melakukan apa-apa, Pak Kakorlantas. Ini di Jambi, Pak. Kemarin Komisi V sudah ke sana.

Nah, kami ini mau ngomong sama siapa? memang ada kewenangan Kementerian Perhubungan, aset punya Kementerian PUPR ya, penegakkan hukum dari Korlantas Polri. Ini keluhan masyarakat sudah nyampai di kami, Pak. Dan sampai hari ini, belum ada jalan keluar. Terpaksa kemarin Komisi V ke sana ya, dan yang kita temukan ribuan konvoi kendaraan ini, kalau tidak dicepatkan cari solusinya, masalah, Pak. Jalan sekarang rusak, tapi kondisi rusak jalan ini Pak Dirjen bilang, Pak Lasarus, ini kalau diperbaiki jalannya, sementara aturan main masih seperti ini, sama dengan membakar uang, kapasitas jalan kita kekuatannya sekian, tapi kendaraan-kendaraan yang lewat jumlahnya sekian dengan tonase sekian. Diperbaiki hancur lagi, diperbaiki hancur lagi, terus *piye*

Nah, ini Pak Korlantas, mumpung, kita ini kan *ndak* gampang-gampang bisa ketemu, karena Bapak bukan mitra kerja Komisi V, mitra kerjanya Komisi III, Polri, mumpung hadir di rapat Komisi V, terkait evaluasi penggunaan jalan ini, sebentar lagi kita mau lebaran, Pak. Jangan sampai nanti lebaran di sini terjadi titik macet yang tidak ada jalan keluarnya, Jambi Pak, di Jambi. Ini aspirasi masyarakat umum pengguna jalan di Jambi, minta supaya perusahaan tambang ini bikinlah jalan sendiri. *Nah*, ini kalau dibiarkan terus, Pak, akan terus-terus di situ, *nggak* akan ada jalan keluarnya. Ini menimbulkan masalah. Kemudian juga masalah keselamatan berlalu lintas sudah pasti.

Baik.

Pesan Pak Bakri dan masyarakat Jambi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan segera ada jalan keluar, ya Pak Bakri, ya.

Sekarang ke pendalaman.

Saya persilakan yang pertama, Bu Cen katanya mau ada menyerahkan cenderamata.

Saya persilakan.

F-PG (CEN SUI LAN):

Siap, Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Nah, kepada siapa yang dituju? Ini Musang King ya Bu? oh bukan. Ya, rupanya belum cukup tadi Pak Menteri, ini kalau politisi jadi jualan di Dapil ini.

Baik, terima kasih Bu Cen Sui Lan, beliau tidak ngambil opsi bicarannya, mau menyerahkan oleh-oleh buat Pak Menteri.

Selanjutnya untuk pendalaman yang pertama Ibu Sri Wahyuni, silakan.

F-NASDEM (SRI WAHYUNI):

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih, Bapak Ketua dan Bapak Wakil ketua.

Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi V beserta Wakil Ketua,
Yang saya hormati juga rekan-rekan Komisi V,
Yang saya hormati Pak Menteri dan Pak Dirjen yang mewakili
Kementerian PUPR, badan-badan,
Pak Kakorlantas beserta seluruh jajaran,

Sebelum sampai, saya sampaikan ini Pak ketua, saya mohon maaf, mungkin saya di luar dari pada materi kita bahas hari ini. Dan mohon maaf, kalau yang saya sampaikan juga nanti ada yang tidak berkenan.

Yang pertama saya sampaikan karena ini forum evaluasi, baik kepada kementerian yang hadir pada hari ini, badan-badan maupun di internal Komisi V. Saya berharap sekali terutama kepada Anggota Komisi V yang sangat saya hormati, saya sayangi, saya cintai. Dalam hal pengajuan program aspirasi untuk di Dapil dan konstituen kita. Bukan kah kita di Komisi V ini sepakat sebagai fraksi Komisi V, sejak awal kita bersama-sama di Komisi V ini. Untuk program aspirasi yang kita bawa ke Dapil masing-masing, saya berharap tidak ada tumpang tindih atau *double-double* pengajuan di satu titik lokasi program. Misalkan, saya berbicara untuk diri saya sendiri. Ketua, tolong, mohon maaf Ketua, bahwa saya ini di Dapil VII Jawa Timur, satu Dapil dengan Pak Ali Mufti yang juga satu Dapil di Jawa Timur dan kebetulan kami satu kampung di Kota Ponorogo. Kebetulan Pak Ali hadir disini.

Nah, di satu titik yang saya ajukan itu ternyata Pak Ali juga mengajukan program yang sama, padahal kan masih banyak program dan titik-titik di Dapil VII, Dapil VII itu luas sekali, terdiri dari lima...

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Bu Sri Wahyuni, sebentar, Bu sebentar, ini kayaknya kita loncatnya kejauhan ini.

F-NASDEM (SRI WAHYUNI):

Iya Pak, mohon maaf, kan saya dari awal sudah sampaikan tadi.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Sebentar, sebentar Bu, sebentar, nanti yang terkait dengan tumpang tindih dengan sesama anggota komisi, kita bahas di Rapat Internal.

F-NASDEM (SRI WAHYUNI):

Baik, Ketua.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Forum ini tidak bisa menyelesaikan.

F-NASDEM (SRI WAHYUNI):

Baik, Ketua.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Forum ini tidak bisa menyelesaikan.

F-NASDEM (SRI WAHYUNI):

Baik, Ketua.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

kita hari ini, agendanya evaluasi Natal dan tahun baru.

Terima kasih, Bu.

F-NASDEM (SRI WAHYUNI):

Ya, Ketua.

Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa saya keluar dari materi dan hanya, saya hanya sedikit, hanya 2 hal yang saya sampaikan, Ketua. Bahwa dalam pengajuan apa namanya pengajuan program tidak saling berebut lokasi, itu saja.

Yang kedua, dan mohon maaf kalau memang ini menyinggung perasaan teman-teman yang lain, tetapi inilah yang terjadi di Dapil saya.

Selanjutnya yang kedua, kepada jajaran kementerian, atau balai-balai dan Dirjen-Dirjen yang hari ini hadir hampir lengkap. Saya merasa perlu lebih bijaksana dan memberikan keterangan baik kepada media maupun pejabat atau pimpinan daerah, terkait program pembangunan hasil aspirasi dari Anggota DPR RI, ya itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya yang belum terlaksana ataupun yang sudah terlaksana, khususnya sebagai contoh yang baru saja kejadian, Dapil saya juga nih, Pak Ketua. Ini saya tujukan kepada BBPJA Jatim-Bali, ini supaya tidak terjadi salah tafsir dan justru menimbulkan efek politis yang negatif, bahkan mengakibatkan kegaduhan di masyarakat, karena adanya kelalaian dan ketidaktepatan dalam memberikan pernyataan, seperti itu. Perlu diingat juga balai-balai di bawah kementerian, khususnya kementerian PUPR ini, ada fasilitator, anda adalah fasilitator dan juga unit pelaksana kegiatan di daerah. Jadi, mohon ini menjadi evaluasi kepada jajaran kementerian-kementerian di daerah, khususnya balai-balai pelaksana kegiatan perlu lebih hati-hati, ini saya khususnya kepada Kementerian PUPR.

Saya berharap hari ini Pak Menteri hadir, ternyata beliau tidak bisa hadir. Terus selanjutnya, jangan sampai ikut, ikut bermain politik, atau mungkin tidak paham politik, jadi kadang-kadang salah-salah supaya di masing-masing kita Anggota Komisi V ini semakin baiklah. Di Komisi V ini kankita sudah beberapa tahun dan kerja sama dengan baik, saling menghormati, saling menghargai, terutama dalam hal pembagian program.

Saya rasa itu saja, Pak Ketua. Mohon maaf sekali lagi saya menyampaikan di luar materi, karena ini ke depan, saya berharap tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti di Dapil saya.

Terima kasih

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Bu Sri Wahyuni.

Kita sudah tangkap pesannya, nanti kita bahas lebih dalam di Rapat Internal.

F-NASDEM (SRI WAHYUNI):

Makasih, Ketua.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Selanjutnya, Pak William, bersiap-siap Pak Tamanuri.

F-PD (WILLEM WANDIK):

Baik.

Pak Ketua dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V, dan juga Pak Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, Kepala BNPB, dan Dirjen Bina Marga, dan Direktur Keselamatan dan Keamanan Kakorlantas Polri, serta Direksi Transportasi yang hadir pada kesempatan hari ini,

Kami memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Nataru 2022-2023 di seluruh wilayah Indonesia, dengan melihat kerja bersama, ini menjadi kekuatan bangsa kita dalam mendorong pemulihan ekonomi dan juga peningkatan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dan berdasarkan pengawasan kami, ada ketidaknyamanan pengguna transportasi lebih pada mahalnya harga tiket, karena kenaikan harga tiket khususnya pesawat dan semoga pada saat pelaksanaan libur lebaran nanti, kiranya Kementerian Perhubungan dapat mengendalikan kenaikan harga tiket ini dengan baik, termasuk kemungkinan besar kenaikan harga tiket kereta api, karena saat ini sudah ada tanda-tanda untuk kenaikan harga tiket kereta api dan juga adanya lonjakan penumpang pada kereta api juga sangat tinggi pada saat libur lebaran nanti.

Berikut selain itu, khusus untuk BMKG dan Basarnas agar pengamatan gempa dan penanganan di Jayapura, diperhatikan karena hingga hari ini masih ada gempa berlangsung. Sejak hari ini, per hari ini mungkin kurang lebih sekitar 8 kali terjadi gempa di Jayapura, dan gempa di Jayapura ini sering terjadi dadakan, bahkan hasil penelusuran dan penelusuran dari BMKG sudah berikan nama, bahwa gempa yang terjadi di Jayapura dan sekitarnya adalah *black swan* ya, dan terbilang ini sangat berbahaya. Karena itu, tolong menjadi perhatian, terutama dalam hal memberikan informasi kesiapsiagaan bagi warga di Kota Jayapura dan sekitarnya.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak William.

Pak Tamanuri, mau diambil kesempatannya? baik, silakan Pak, singkat-singkat saja, karena kita jam 14.00 ada Raker dengan Menteri Desa.

F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):

Saya merasa rugi kalau saya *nggak* ambil, Pak.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Oke, silakan Pak Tamanuri, bersiap-siap Pak Irwan.

F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):

Asssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pak Ketua, sama Pak Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota Dewan yang saya banggakan,

Bapak Menteri,

Pak Kepala BMKG,

Pak Kepala Basarnas,

Pak Dirjen yang mewakili Pak Menteri PU, Pak Kakorlantas yang berbahagia,

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Menteri Perhubungan yang pada Nataru yang baru lalu lancar, baik laut, udara, kereta api, maupun jalan darat. Terima kasih, Pak, lancar, tapi *nggak* tahu kalau tempat lain, ini ke Lampung saja yang saya bilang ini, lancar. Kemudian saya *nggak* tahu sampai ke membangun masjid yang ada di Bakauheni itu sudah selesai kelihatannya, apakah dari perhubungan ataukah dari PUPR.

Kemudian, perlu Bapak ketahui juga ini. Ini Pak Dirjen apa Bina Marga atau Pak Menteri Perhubungan, ini truk-truk yang ke Merak itu atau dari Merak ke sini, itu nangkringnya di pinggir jalan tol itu semua itu, dijadikan tempat parkir, jadi ini akan menghambat arus lalu lintas, sedangkan itu kan statusnya jalan tol yang tidak bisa terhambat, jadi mohon itu perhatian.

Kemudian Pak Dirjen Bina Marga. Ini waktu yang lalu, kita menjelang hari Natal dan tahun baru, perbaikan dikejar di sana sini, perbaikan jalan negara, tapi saya agak herannya, kenapa tambal sulam itu kok nambalnya itu mesti agak melendung ya, kemudian sampai hampir akhir belum selesai juga, itu dari Terbanggi sampai ke Sukabumi. Jadi ini apakah memang *nggak* bisa rata antara aspal yang lalu dengan aspal sulaman itu, apa memang harus rumusnya begitu harus *melendung* macam gitu.

Kemudian kalau kita lihat, kalau saya pulang tiap minggu ke Lampung, *nggak* pernah yang *nggak* ada rehab di jalan tol itu, dari Bakaheuni sampai ke

Kota Baru, Bandar Lampung. Apakah memang walaupun konstruksinya sedemikian rupa, akan tetapi selalu rusak terus? saya juga kasihan itu, tidak pernah benar-benarnya, juga Jalan Soekarno-Hatta dari Panjang sampai ke Tugu Raden Inten itu, juga rehabnya saya pandang kurang baik, sama dengan apa yang di Terbanggi tadi, kondisi melendung, kemudian belum beres yang ditambah sulam disini, disitu sudah rusak lagi, karena itu belum tentu belum di kerjakan karena belum termasuk programnya, sehingga dia akan bertambah lebar dan dalam. Kemudian kalau bisa, jembatan Terbanggi yang baru dibangun itu, ini sampai sekarang sudah dua bulanan beres, tetapi dipalang, dipalangi sama segala macam, jadi mobil *nggak* bisa lewat jalan situ, sehingga menimbulkan satu kemacetan apabila mobil ramai dari Kota Bumi, dari Menggala, ya karena itu simpang tiga yang akan masuk ke jalan tol.

Pak Kakor, saya akan menanyakan ini, karena perpanjangan RF ini kok *nggak* bisa lagi, apakah memang sudah stop, itu *nggak* bisa ada lagi RF. Ibu profesor, ini kan waktu berapa waktu yang lalu itu, waktu ekstrim- ekstrimnya, saya segala macam kasur-kasur sudah saya keluar, karena informasi adalah ada hujan besar dan angin puting beliung. Ini keluarnya kan dari BRIN, mana yang harus diikuti, BRIN apa Ibu ini?

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Tamanuri.

Pak Irwan, mau bicara? Baik.
Lanjutnya siap-siap Pak Suryadi Jaya Purnama.

F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, serta Anggota Komisi V yang saya banggakan,
Yang saya hormati Menteri Perhubungan,
Kepala BMKG,
Kepala Basarnas,
Kementerian PUPR RI,
Pak Dirjen Bina Marga,
Korlantas Polri serta seluruh jajaran Kementerian yang hadir pada rapat hari ini.

Terkait Nataru, kami mengapresiasi Pak Menteri serta seluruh tim Nataru Republik Indonesia, dengan segala kerja kerasnya *alhamdulillah* bisa

kita lewati Nataru kemarin, tentu ada beberapa yang kemudian menjadi evaluasi dan menjadi masukan untuk menghadapi puasa dan lebaran di mulai Maret-April.

Terkait permasalahan Nataru ini yang saya lihat memang, salah satunya juga bicara mengenai alur lalu lintas dan salah satu penyebab utamanya itu kadang-kadang antrian BBM.

Nah, pada kesempatan ini, mungkin kami mendorong pemerintah, karena ini momentumnya sebenarnya, apalagi ini hari kasih sayang kan. Jadi kami mendorong pemerintah, momentumnya apalagi menyambut lebaran dan puasa ini untuk menurunkan BBM karena harga minyak dunia per hari ini sudah turun, 75 sampai 79% USD per barrel, jauh marginnya dari asumsi harga minyak yang kita tetap di APBN. Kenapa menurunkan BBM ini salah satu kunci sebenarnya? karena beberapa sebenarnya permasalahan transportasi, permasalahan lalu lintas juga dari BBM ini. Contohnya di Dapil saya, di Kaltim, antrian kendaraan sampai kilometer yang kemudian merusak badan jalan, karena antrinya sehari-hari di situ itu ya, karena baik *supply* maupun harga BBM ini yang kemudian tidak stabil. Jadi menurut saya, salah satu sebenarnya momentumnya adalah menurunkan BBM ini untuk menghadapi puasa dan lebaran.

Kemudian Pak PUPR, untuk di Kaltim sendiri *alhamdulillah*, *progress* jalan nasional kita terus membaik. Cuma untuk menghadapi puasa dan lebaran ini kami berharap sambil menunggu pekerjaan *multi-years* yang sudah apa namanya, lelang dan lain-lainnya agar beberapa segmen yang memang sedang kondisi rusak, terutama dari Kota Bangun yang menuju KutaiBarat, kemudian segmen dari Bontang, Sangata, Simpang Perdau itu agar bisa kemudian ada penanganan di awal, sehingga menghadapi puasa, lebaran ini tersambung mulus walaupun belum direkonstruksi itu, tapi sambil menunggu pekerjaan yang sudah persiapan lelang agar bisa ditangani, sehingga pelaksanaan nanti di puasa-lebaran betul-betul dinikmati dan aman, dan masyarakat yang menggunakan juga bisa selamat.

Kemudian terkait pelaksanaan Nataru ini juga pelaksanaan yang humanis dari Korlantas Polri, kami juga apresiasi, sangat sedikit kami lihat apa namanya, kejadian-kejadian pelanggaran yang kemudian menjadipidana, apalagi dan tentu humanisme di lapangan itu juga menjadi kunci dari pelayanan Korlantas Polri selama Nataru.

Terkait kemudian mitigasi bencana dari BMKG dan Basarnas, kami tetap ya, apalagi apa namanya, kondisi kita, kemudian beberapa yang tidak bisa diprediksi, termasuk kayak gempa dan lain-lainnya agar kita bisa kemudian terus meningkatkan beberapa terobosan-terobosan yang bisa diterima masyarakat secara *update* terkait informasi, baik terkait cuaca maupun kemudian potensi bencana juga dalam penanganan tentunya.

Mungkin itu aja, Pimpinan. Tapi kami menekankan terkait BBM ini sangat penting karena kalau kemudian BBM ini bisa stabil, maka menghadapi

puasa lebaran harga-harga sembako bisa turun kemudian lalu lintas lancar, masyarakat sejahtera.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih Pak Irwan.
Pak Suryadi, siap-siap Bob Andika.

F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Baik.

Terima kasih, Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahiim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pak Ketua, Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi V,

Bapak Menteri Perhubungan dan seluruh jajaran,
Bu Prof, Kepala BMKG beserta seluruh jajaran,
Pak Marsekal Ery beserta seluruh jajaran,
Pak Dirjen, Pak Kakorlantas Polri ya, beserta
Seluruh hadirin sekalian.

Karena ini kita rapat evaluasi pelaksanaan ya Nataru, saya kira kita fokus di tema ini. Karenanya pertama saya apresiasi secara keseluruhan penanganan Nataru kita pada tahun ini relatif cukup bagus ya, terutama koordinasi 5 kementerian/lembaga ini. Jadi saya merasakan di lapangan juga koordinasinya relatif cukup bagus dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan.

Namun demikian, Bapak-Ibu hadirin sekalian, karena pelayanan angkutan Nataru atau angkutan lebaran nanti merupakan pelayanan yang selain lancar, tapi yang paling utama adalah keselamatan, keamanan, kenyamanan. Karena bagi masyarakat kita, Nataru atau mudik itu selain bagian dari tradisi tapi dia juga sesuatu yang mengasyikkan. *Nah*, jadi perjalanan ini harus kita buat asyik, jangan sampai justru terjadi kecelakaan ataupun hal-hal hal yang mungkin mengganggu ya, "kenikmatan" aktivitas masyarakat itu, karena saya ada beberapa catatan, Pak Ketua.

Pertama, di jalan tol ya, khusus di Tol Cipali, itukan dinobatkan sebagai salah satu tol yang angka kecelakaannya tertinggi. Ini ada anomali ya. Kalau secara konstruksi Tol Cipali ini relatif bagus, standar pelayanan minimalnya

juga dibanding beberapa ruas tol lain cukup bagus, tapi kecelakaannya tinggi sekali. Bahkan di, saya dapat ya dari data Kementerian Perhubungan itu ya satu orang korban per satu kilometer, *gitu*. *Nah*, salah satu penyebabnya adalah karena adanya *gap* kecepatan antar kendaraan yang bisa sampai 100 kilometer lebih. Jadi kendaraannya yang cepat bisa 150 kilometer, kemudian ada kendaraan-kendaraan besar, kendaraan tronton, itu 40 kilometer, ini terlalu jauh perbedaannya, padahal kan disarankan itu perbedaan kecepatan di dalam jalan tol itu sekitar kurang lebih 30 km.

Nah, ini mungkin perlu di evaluasi regulasinya supaya tidak, jalannya sudah bagus, tapi karena pengaturan kecepatan ini tidak diatur, akhirnya terjadi kecelakaan, karena perbedaan kecepatan antara yang ngebut, boleh ngebut cepat sekali, sementara yang lambat, boleh lambat sekali *gitu*, ini kan jadi faktor, dan itu dari hasil Litbang Kementerian Perhubungan kalau tidak salah ya dari jurnal yang kami baca, salah satu faktor utamanya itu. *Nah*, barangkali ini perlu dievaluasi ya, termasuk ruas tol yang lain.

Nah, berikutnya adalah, kecelakaan itu selalu paling besar, terutama di lalu lintas, *nah*, ini roda dua ya, walaupun pemerintah misalnya ada subsidi angkutan lebaran gratis atau Nataru begitu, masyarakat tidak berkurang menggunakan kendaraan roda dua dan selalu terjadi kecelakaan terbesar itu di roda dua, karena faktor keselamatannya kan sangat minim. Salah satu penyebabnya itu adalah karena kecepatan yang tidak terkendali. Saya berharap dalam forum yang berbeda mungkin nanti, kita ada koordinasi dengan kementerian lain, misalnya Kementerian Perindustrian. Bayangkan misalnya motor yang beredar di Indonesia ini, itu kecepatannya sampai 240 kilometer/jam dan itu dijual secara legal. Tapi di mana jalan yang membolehkan kecepatan di atas 200 kilometer, ini sering saya sampaikan, Pak Ketua. Pemerintah mengizinkan menjual barang ilegal dan dengan spek yang tinggi itu kita bayar mahal, tapi begitu kita pakai ditangkap oleh Pak Polantas.

Nah, mestinya Kementerian Perindustrian itu membatasi kecepatannya kendaraan roda dua yang beredar di masyarakat, ya kecuali misalnya kendaraan khusus, misalnya untuk kepolisian boleh secepat-cepatnya, karena untuk *ngejar*, misalnya ada kriminal, *gitu*.

Nah, ini menurut saya salah satu yang juga menjadi faktor penyebab. Kita tidak menyediakan jalan yang memungkinkan kendaraan itu dengan kecepatan tinggi, tapi pemerintah menjual barang yang tidak ada sarananya di... *Nah*, ini kan akal-akalan dunia industri, *gitu ya*. Ini perlu kita perlebar nanti penyebabnya, supaya jangan, kasihan ini Pak Polisi, *gitu*, menangani kecelakaan, tetapi penyebab akarnya itu tidak kita buat, dan pemerintah berhak membuat regulasi itu.

Nah, berikutnya juga dalam catatan saya, misalnya SAR ini banyak menangani kejadian di laut, ya ini faktornya juga faktor keselamatan, misalnya di kampung saya di Lombok ya, di Gili Trawangan itu, itu *speedboat* nya, saya beberapa kali naik, memang tidak layak untuk mengangkut penumpang. *Nah*,

mungkin perizinannya juga harus dievaluasi, misalnya ya, saya lihat jerigen tempat bahan bakarnya itu di luar, di sebelahnya itu ada penumpang sampai ngerokok atau bahannya misalnya pakai fiber ya. *Nah*, itu kan asuransi tidak menerima dan banyak kejadian yang seperti itu, sehingga mungkin ini perlu diperketat ya penggunaan *speedboat* yang speknya memang tidak memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, tapi beroperasinya cukup banyak, terutama di daerah-daerah kepulauan. Karena saya menyarankan misalnya setiap kapal yang di bawah 300 GT itu juga didaftarkan di SAR ya, supaya SAR bisa memantau, itukan punya alat, Pak, ya tapi banyak mereka ini lalu lalang dekat kantor SAR, tapi tidak terpantau, karena tidak didaftarkan, begitu kejadian kan cepet di mana koordinatnya bisa diketahui. *Nah*, ini mungkin regulasi semacam ini perlu kita buat *gitu*. Ya, karena kami di daerah kepulauan itu sering terjadi kecelakaan, yang untungnya nelayan kita berkeliaran, jadi cepet tahu *gitu*. Padahal kan sebenarnya dengan alat, dengan regulasi, kita bisa lebih cepat penanganannya. Jadi itu beberapa catatan ya.

Kemudian berikutnya ini untuk perbaikan ke depan, beberapa ruas jalan nasional yang hasil kita kunjungan ke mana-mana itu ada, bukan penyempitan ya, tapi karena arus lalu lintas yang semakin banyak, akhirnya terasa lebih sempit, sehingga perlu pelebaran. *Nah*, tetapi dalam Perpres 55/2018 ini Pak Dirjen, itu pembebasan lahan untuk jalannya nasional dibebankan kepada Pemda, yang akhirnya sering jadi kendala, ya padahal dalam PP 19/2021, ya tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bertanggung jawab pengadaan lahan itu adalah instansi yang punya kepentingan, *gitu*. *Nah*, ini perlu disinkronkan supaya jangan ada kendala, kita ingin melebarkan jalan karena kapasitas jalan sudah tidak memadai, lalu tanggung jawabnya kepada pemda, pemda kita tahu saat ini memang sedang kesulitan keuangan.

Nah, ini barangkali regulasi yang semacam ini perlu kita evaluasi supaya pelayanan ke depan makin lebih baik, karena beberapa ruas jalan nasional kita terasa makin sempit. Padahal sebenarnya sih tidak, cuma karena harus arus lalu lintas yang makin padat, kemudian kendaraan juga dengan beragam spesifikasi yang lewat akhirnya sudah tidak muat ya, sehingga perlu pelebaran di beberapa ruas, ya nanti ini.

Terakhir, Pak Ketua, saya mengajak Komisi V untuk secara konsisten dan komitmen kuat ya untuk mem-*backup* dukungan anggaran untuk 2 lembaga kita ini, SAR dan BMKG. Kita beberapa kali kunjungan, itu masalahnya kekurangan SDM dan kekurangan alat, yang kedua adalah anggaran, sehingga memang perlu ada, misalnya beberapa kantor SAR di daerah yang harus kita tingkatkan statusnya, karena memang kebutuhan ya, lokasi itu, misalnya daerah wisata sudah mulai padat *gitu*, tapi hanya satu-dua orang personilnya *gitu*, sehingga memang perlu ada dukungan secara khusus dari Komisi V untuk penguatan kelembagaan, penguatan personel, dan peralatan ya, karena kita ini daerah bencana. Saya kira ini, dzolim kita kalau tahu bahwa akan sering terjadi bencana, tetapi kita tidak menyiapkan diri dan negara punya instrumen melalui 2 lembaga ini yang punya kompetensi untuk

menangani kebencanaan untuk pencegahan di BMKG, untuk mengetahui lebih awal dan penanganannya di Basarnas, karena ini mitra kita, Pak Ketua, saya usul perlu ada catatan khusus untuk penguatan anggaran. Selama ini kita ya bahas ya jalan-jalan begitu saja, *gitu* saja, ya. Harus ada komitmen ya untuk ke depan. Ya, karena bisa jadi dan saya yakin semua keluarga kita ini pernah menjadi korban bencana dan seterusnya dan kita sangat membutuhkan pelayanan dari Basarnas, kemudian dari BMKG maupun juga dari instansi yang lain.

Mungkin demikian, Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Suryadi.

Kalau anggaran itu, Pak, kalau gelondongnya taruh di sini, suruh Ketua, Pimpinan, Bapak-Bapak yang atur, Bapak percayalah anggaran BMKG sama Basarnas tidak seperti ini, Pak, taruhan saya. Kita sudah bikin surat Pakke Pimpinan DPR ya, terkait dengan kondisi terutama Basarnas tempo hari, saya masih ingat tahun lalu ya. Saya bikin surat, saya tanda tangani, minta supaya ditambah anggarannya. Tapi karena yang memutuskan teman-teman di Banggar, ya pertimbangan Banggar juga yang terakhir yang mengeksekusi usulan kita, *gitu loh*. Jadi, nanti saya pesanlah kepada teman-teman seluruh fraksi yang menjadi Anggota Badan Anggaran ya, untuk kiranya disuarakan ketika rapat di Badan Anggaran, dan kebetulan Pimpinan ini, ini kita ini *enggak* ada Anggota Badan Anggaran ya, Pak? Pak Robert nggak? ya, jadi Pimpinan-Pimpinan itu *enggak* ada Pak, Anggota Badan Anggaran. Jadi Pimpinan, Pimpinan, kalau anggota ada, ada banyak Anggota disini yang Anggota Badan Anggaran, kita titip pesan apa yang disampaikan oleh Pak Suryadi Jaya Purnama, ini saya suka salah-salah, kadang-kadang saya nyebut Cahaya Purnama, rupanya Jaya Purnama.

Baik.

Berikut Bob Andika, bersiap-siap Pak Sumail.

F-PDI PERJUANGAN (BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati, Pimpinan Komisi V beserta seluruh teman-teman Anggota komisi V,

Yang saya hormati Pak Menteri Perhubungan,
Pak Menteri PUPR yang mewakili Pak Dirjen Bina Marga,

Ibu Kepala BMKG,
Pak Kepala Basarnas beserta yang mewakili Kakorlantas, beserta
Seluruh jajaran yang hadir hari ini,

Saya langsung saja, Pak. Saya mengapresiasi juga atas pelaksanaan Nataru yang kita lihat tadi penjelasannya cukup menekan angka kecelakaan yang selama ini tinggi menjadi rendah walaupun masih ada yang perlu ke depan dievaluasi, bagaimana pelaksanaan-pelaksanaan Nataru ke depan.

Yang pertama, Pak, saya ke Pak Dirjen yang mewakili Menteri PUPR. Kita tahu, Pak, bahwasannya natal dan tahun baru ini memang selalu di bulan 11 dan 12 itu, selalu cuaca tidak mendukung, Pak. Ini yang berakibat, berdampak pada jalan-jalan nasional kita yang banyak yang rusak, Pak. Salah satunya Sumut ini, Pak, yang cukup antusias juga dalam melaksanakannatal dan tahun baru, Pak. Kita lihat salah satunya, Pak, itu menuju Medan- Brastagi ini, Pak, ini jalan ini digunakan juga oleh Provinsi Aceh, bukanProvinsi Sumut saja, Pak. Ke depan saya berharap kepada Pak Dirjen, dalam menyambut natal, tahun baru ke depan kita mohon di tiap balai itu mungkin ditingkatkan lah, Pak, pemeliharaan-pemeliharaan anggaran, pemeliharaan- pemeliharaan jalan, Pak, walaupun jalan tersebut sudah Bapak anggarkan di 2023. Karena akibat cuaca yang tidak mendukung, Pak, jalan-jalan tersebut memang harus penanganan pertama untuk mengurangi kemacetan, Pak, harus memang dibantu dengan anggaran-anggaran pemeliharaan, Pak. Karena jalan tersebut memang kita lihat kalau macet luar biasa, Pak, bisa sampai 7 jam. Bagaimana masyarakat cukup antusias menggunakan jalur tersebut untuk menyambut natal dan tahun baru. Mungkin ini ke depan kita berharap jalan tersebut tetap ada lah, Pak, anggaran untuk pemeliharaan menuju Medan-Brastagi tersebut karena kita selalu tanya sama balai, anggaran memang tidak cukup untuk memelihara jalan tersebut.

Untuk Kementerian Perhubungan mungkin Pak Dirjen, Pak Menteri agak keluar, untuk Ibu Dirjen Perhubungan Udara, Bu, untuk Bandara Kualanamu tersebut, Bu, yang Sumut ini, Bu. Memang kalau kita harapkan, Bu, sering saya lihat penggunaan *x-ray* nya itu, Bu, itu kan ada dua pintu Bu, tapi apabila ada maupun Nataru atau menuju lebaran ini, Bu, memang kenapa pintu yang satu lagi selalu tidak dibuka Bu, padahal *x-ray* nya aktif, tapi tidak selalu dibuka, sehingga masyarakat itu memang betul-betul mengantri luar biasa, Bu, ini ada apa, Bu? apakah kurang personel? saya rasa tidak mungkin kurang personel, personil pasti luar biasa di dalam itu, Bu. Mungkin ini yang harus ke depan Ibu akan evaluasi, kenapa ini tidak selalu digunakan pintu- pintu tersebut yang mengakibatkan masyarakat mengantri luar biasa cukup panjang.

Mungkin ini saja Pimpinan yang bisa saya sampaikan.

Saya ucapkan terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Ya, yang Pak Bob tadi sampaikan Pak, ya, Ibu Dirjen Udara ya, di sini ada, saya sendiri sering nemui, Bu, di bandara, kan kalau kita kan karena berangkat pakai jalur umum, kadang-kadang kan mereka *enggak* tahu kita nih siapa.

Saya beberapa kali bersitegang dengan petugas di situ, orang sudah antri panjang, satunya ditutup. Saya tanya itu rusak? *enggak*, Pak, bagus, Pak, petugasnya *enggak* ada, padahal dia ramai di situ. Saya rasa ini salah satu titik masalah sederhana yang mengganggu kenyamanan banyak orang. Saya rasa Ibu Dirjen yang baru ini, Pak Bob ini kan Dirjennya baru ini, jangan lihat kecil-kecil ini, kecil-kecil cabai rawit ini. Pasti nanti akan dirapikan sama Bu Kristin ini.

Baik.

Pak Djendri, bersiap-siap Pak Mulyadi, pas?
Pak Mulyadi pas juga?
Lanjut, ya silakan.

F-GERINDRA (DRS. H. MULYADI, M.MA.):

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,
Pimpinan yang saya hormati,
Rekan-rekan Anggota yang saya banggakan,
Mitra pemerintah, dari pemerintah mitra Komisi V yang saya hormati,

Tentu pertama sama, saya mengapresiasi atas upaya-upaya terbaik untuk hadir di tengah masyarakat terkait agenda Nataru. Saya Dapil Kabupaten Bogor, Bapak, izin. Kalau sudah bahasa natal dan tahun baru, saya pun ikut piket sebenarnya, sampai *handphone* saya *hang*, terutama apa? dikomplain oleh warga, warga mana? Megamendung, Ciawi dan sekitarnya. Ya, saya tetap harus bersuara dan mengulang-ulang sebagai klarifikasi bahwa saya tidak diam, *gitu*.

Nah, ini penting barangkali sebagai masukan terutama dari Korlantas. Saya tahu kerja Bapak-Bapak luar biasa 24 jam, sayapun kadang-kadang terjebak macet dan terusir pula, Pak, padahal saya ada agenda, ya sudah saya ikuti aja. Tapi intinya, puncak tidak boleh dibiarkan terus menerus, mau sampai kapan. Maka izin, waktu itu saya komunikasikan untuk mencari opsi dengan cepat, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak sedikit saja ngambil perhatian

untuk dari Hanjawar, Pak, ya menuju Jagorawi, itu jalannya sudah *confirm* bagus dari sisi Cianjur, Pak. Kalau puncak tersumbat, itu *confirm* pasti masuk ke Hanjawar, Pak, tapi dari perbatasan Cianjur ke Bogornya jalannya rusak. Saya semangat betul, Pak Ketua, masuk di Panja revisi Undang-Undang Jalan. Saya pikir dengan ulang tahunnya undang undang apa revisi Undang-undang jalani itu, itu segera ada solusi. Ini saya kira *confirm*, Pak Dirjen Bina Marga, kalau berkenan, saya sudah dihubungi juga oleh Kepala Balai Bapakdi Jawa Barat, dilihat Pak, ini bisa jadi opsi terbaik dan cepat kalau kita menghadapi libur lebaran nanti karena puncak bukan saja sebagai jalur isu lintasan, Pak, tapi destinasi wisata. Sampai kapan pun kayaknya Puncak itu terus menerus menjadi idola, Pak ya, sebagai bagian dari nostalgia, ada yang penasaran puncak itu di mana terus-menerus begitu.

Itu saya minta atensi luar biasa dari pemerintah dan saya selalu bilang negara harus hadir, jangan seperti kita menganggap tidak ada masalah dengan orang berjam-jam begitu, terjebak macet, sementara kita sedangterlena dan saya ikut piket Pak sekali lagi Pak. *Handphone* saya sampai *hang* berkali kali, kalau saya mati, di *complain* Handphonenya, Pak. Ini curhat saja ini kalau Nataru.

Kemudian Pak Menteri Perhubungan, Pak saya berharap juga ini saya harus suarakan berkali-kali Pak, kalau misalnya konsentrasi Halim menjadi area komersial, Pak, saya *kok* lebih senang ke Halim sebenarnya daripada ke Soekarno-Hatta, Pak, karena macet.

Nah, ke depan, apalagi kalau misalnya membantu kami untuk mengatasi macet itu konsentrasi dipecah lagi aja, Pak, jika memungkinkan tadi kan, apa, helikopter *standby*, bisnis *private jet*, cargo dan segala macam di Halim, Pak, Atang Sanjaya Semplaknya coba dikaji, Pak. Saya dengar IPB sudah melakukan kajian juga Pak untuk membuat Atang Sanjaya semplak itu menjadi bandara komersial. *Nah*, jadi kalau misalnya pemecahannya seperti itu, saya kira arus pagi untuk ke bandara. Saya kalau pesawat pagi *confirm* Pak, saya ngep di hotel bandara, Pak, karena saya *enggak* yakin dengan anomali lalu lintas. Bapak kalau iseng bangun jam 5 subuh, menuju Jakarta, Pak, bukan bandara, Pak ya, saya kemarin jam 4 pagi, Pak, sudah macet, Pak. Saya kadang-kadang sedih, Pak, saya *enggak* berdaya, Pak, dengan kekuasaan yang konon saya menjadi orang representasi rakyat, tapi saya harus suarakan. Bapak sekali-kali bareng-bareng kami fasilitasi, Pak, kita berangkat dari Puncak itu jam 4 pagi, Pak. Sampai kilometer 20-an, Pak, sudah macet, Pak. Dibikin *contraflow* oleh teman-teman lalu lintas, *enggak ngefek*, Pak, itu saya kira solusi lain, siapa tahu misalnya bisa opsi, sudahlah ke bandara untuk komersial wilayah Indonesia Timur atau Barat misalnya ke Atang Sanjaya Semplak saja, misalnya ya. Kalau Halimnya, izin Pak menteri, bukan ngajar, karena saya kadang-kadang tidak bicara salah, kalau bicara ini orang-orang hebat, *gitu* ya. Saya kira saya sebagai bagian dari masukan saja, Pak, sebagai warga Dapil, saya kira mudah-mudahan menjadi perhatian kedepan.

Kemudian, Pak Korlantas, saya izin, Pak, barangkali ada koordinasi

lah, Pak, dengan, sekali lagi jalan tol *elevated*, Pak ya. Saya masih sering banget itu lihat mobil-mobil *travel* ya yang masih masuk banyak di *elevated*, kenapa itu kan penumpang umum, Pak. Saya tidak komplain terkait mereka menggunakan jalur itu, Pak, tapi saya *enggak* kebayang *kalo* misalnya terjebak macet di atas, *gitu* ya. *Nah*, kenapa tidak ada kebijakan, ya sudah lah *public transportation* sekali lagi di bawah saja, *gitu*. Yang *elevated* khusus pribadi, jadi mobilitas di atas bisa tetap terjaga *gitu*.

Saya kira itu saja sebagai masukan, banyak sebenarnya, tapi curhatan ini, tadi ya mudah-mudahan ada solusi ke depan Pak menteri, Pak Dirjen dari Kakorlantas juga. Dan tentu saja juga terima kasih kepada Basarnas dan BMKG yang terus melakukan kontribusi terbaik buat hadir di tengah masyarakat.

Salam sehat untuk semua, terus mengabdikan dan berikan kontribusi buat bangsa ini dengan lebih baik.

Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Mulyadi.

Terakhir dari meja Pimpinan, Pak Ridwan, silakan.

F-PG (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya hanya mungkin mau bicara dengan Korlantas ini mungkin. Itu saya pernah me... apa itu, berdiskusi ya, bicara dengan semua hal yang terkait melalui pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kemudian Dinas Perhubungan, kemudian melibatkan industri seperti Dragon yang ada di Kendari itu. Kita koreksi karena karena jalan itu, jalan nasional itu rusak dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang *overload* itu, tambang iya. Waktu itu Undang-undang Nomor 22, Nomor 2 itu belum terbit, belum, tapi pada waktu itu, kita minta agar industri berpartisipasi, karena belum, belum ada undang-undangnya pada waktu itu, belum diatur secara khusus.

Nah, apa yang dijawab oleh, apa namanya, perindustrian tersebut, industri *Virtue Dragon* itu, dia mengatakan bahwa itu bukan mereka, bukan mereka punya kendaraan, karena kendaraan mereka lewat laut. Kalau ada angkutan-angkutan batu misalnya, batu bara dan seterusnya, lain semualewat laut dan dia bikin pra dermaga sendiri. Tapi bahwa dia tidak mau tahu yang menyuplai mereka dari bawah, dari..., dari luar itu adalah semua kendaraan-kendaraan seperti misalnya bahan bakar, kendaraan batu-batulokal yang ada dibutuhkan oleh kendaraan-kendaraan lokal yang ada di sana, artinya mereka transportasi lokal yang dipakai sebagai sub-sub kontraktor

yang ada di dalam, dalam industri itu justru yang dipakai adalah kendaraan anu, kendaraan-kendaraan umum yang melebihi kapasitas jalan, *gitu*.

Nah, maksud saya peran Korlantas ini harus ada, paling tidak adalah soal kelebihan muatan tadi, juga dengan perhubungan, untuk itu bersama-sama, sebab kalau tidak itu jalan hancur luar biasa, dan kita rasakan bertahun-tahun dia, saya rasa Dirjen Bina Marga tahu benar itu jalan Morosi itu, itu bertahun-tahun baru selesai itu, baru..., baru agak apa mulai baik sekarang setelah ditangani langsung oleh Kementerian PUPR. Maksud saya ini harus tegas ini, harus tegas terhadap pelaku-pelaku pelanggaran ini, dan yang bisa melihat ini kan hanya Bapak-Bapak dari lalu lintas yang bisa mengatur atau dari polisi yang bisa menghambat tentang ini, termasuk juga dari perhubungan barangkali untuk mencegah, supaya tidak rusak. Sekarang ini memang sudah ada undan-undangnya bahwa bagi industri yang membangun di sisi dalam, ini sudah membangun jalan sendiri. Tapi bahwa tidak mustahil lagi akan ada hal-hal seperti ini, ya tidak mustahil yaitu modus.

Barangkali hanya itu Pak Menteri dengan Pak Korlantas.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Terima kasih.

Ini kurang lebih dengan masalah Jambi tadi ini. Ya, nanti terakhir saya akan rilis kembali, saya minta ketegasan dari Korlantasnya.

Pak Ishak Mekki, tadi saya lihat katanya mau ambil bicara. Saya persilakan, Pak.

F-PD (IR. H. ISHAK MEKKI, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri,
Pak Dirjen,
Kakorlantas,
Bu BMKG dan Basarnas beserta jajaran yang saya hormati.

Saya langsung saja ke Menteri Perhubungan dulu ya. Dulu kita sudah melalui, melaksanakan kegiatan yang luar biasa, angkutan lebaran tahun 2022, itu banyak kendala kemacetan juga di dermaga ada stagnan, kapal kurang dan sebagainya. Dan *alhamdulillah* di waktu Nataru kemarin itu, ini

sudah lancar dan sudah cukup baik.

Nah, harapan saya ini juga akan menghadapi lebaran juga 2023 dan ini forum ini kan lebih besar dari Nataru, jangan sampai lagi terulang seperti yang sudah, seperti di Merak, *nah*, kapal kecil yang berfungsi, padahal kapal besar masih banyak yang berseliweran di tengah laut tidak difungsikan. Dermaga masih ada yang tidak berfungsi, jalan-jalan masih buka tutup, sehingga macetnya luar biasa, juga *rest area* banyak yang belum berfungsi. *Nah*, ini menjadi perhatian ke depan dan terkhusus lagi ada terminal di Sumatera Selatan, ada 7 terminal tipe A tersebar di Sumatera Selatan, itu sudah dikembalikan ke pusat, ke Menteri Perhubungan dan 2023, saya lihat daftarnya mau dioperasionalkan.

Nah, harapan kita baik sekali dan tidak begitu serta merta harus di operasionalkan begitu saja, harusnya ditinjau dulu, diperbaiki dan dilengkapi sarana dan prasarannya, karena sudah lama tidak berfungsi dan lebaran ini dapat bermanfaat untuk peristirahatan dan juga untuk penumpang-penumpang yang berlalu lalang di jalan raya.

Jadi itu mungkin dari saya untuk Pak menteri. Dan dari Pak Dirjen tadi dipaparkan, bahwa khusus di Sumatera Selatan tadi jalan nasionalnya *alhamdulillah* cukup menggembirakan, jalan lintas tengah 93% mantap, jalan lintas timur 96 mantap, jalan lintas barat semua kondisi baik.

Nah, perlu diketahui ya sejak adanya jalan tol Lampung-Palembang ini, ya, lintas timur ini banyak tidak dilewati lagi, jarang, sehingga berbondong-bondong melalui jalan tol. *Nah*, kondisi jalan tol dari Pematang Panggang ke Kaya Agung, ini sudah 2 tahun tidak pernah baik, 2 tahun dari lebaran '22 sudah bergerak, *full total* untuk perbaikan. Tapi diperbaiki sebelah kiri selesai, rusak di sebelah kanan. *Nah*, ini mau lebaran, kondisinya juga masih parah. *Nah*, ini harapan kita bagaimana mempercepat kondisi jalan tol ini, karena ini disamping menghambat arus lalu lintas juga banyaknya kecelakaan-kecelakan jalan tol yang sedang diperbaiki.

Ketiga, BMKG, saya, ya yang mana BMKG personalnya, Ibu juga sering menyampaikan masalah *big data*. *Nah*, *big data* ini bentuk apa? sampai sejauh mana? *big data* ini direalisasikan untuk menyampaikan informasinya? apa berupa aplikasi? iya, karena penyampaian masalah kejadian-kejadian ini melalui, kebanyakan melalui medsos. *Nah*, kalau itu *big data* yang direncanakan Ibu itu, ya sudah terealisasi karena datanya yang luar biasa banyak, itu sangat membantu sekali tentunya, ya jangan sampai, ya kejadian sudah baru informasinya datang.

Ini saja mungkin.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Saya rasa cukup ya Bapak-Ibu ya? ya, cukup ya Bapak-Ibu ya, ya cukup ya, kelamaan.

F-GERINDRA (IR. SUMAIL ABDULLAH):

Sedikit, sedikit Ketua, mohon maaf tadi apa namanya, ke belakang sebentar.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya, saya.
Habis ngerokok, Pak ya?

F-GERINDRA (IR. SUMAIL ABDULLAH):

Pengasapan sedikit, Ketua.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Biasa, kalau Bapak ngerokok saya selalu izinkan.
Silakan Pak.

F-GERINDRA (IR. SUMAIL ABDULLAH):

Siap, Bapak yang baik hati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya.

Pimpinan dan segenap Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri Perhubungan yang saya hormati,
Ibu BMKG,
Juga Bapak dari Basarnas,
Kakorlantas,
Yang mewakili Kementerian PUPR,
Direktorat Jenderal Bina Marga,

Secara umum ingin kami sampaikan bahwa apresiasi terhadap penanganan Nataru di tahun ini, dimana lonjakan penumpang, mobilitas orang hampir tujuh, kenaikannya 73.3% lah. Artinya apa? bahwa sejak landainya covid ini ada lonjakan yang luar biasa, akan tetapi ada persoalan- persoalan klasik, ada persoalan-persoalan permanen yang tentu dibutuhkan

terobosan-terobosan, mulai kementerian, lembaga, secara koordinatif, secara koordinasi itu harus ada kesepahaman, di dalam mengurai kesulitan-kesulitan atau pun *problem* angkutan yang selama ini banyak terjadi.

Saya ambil contoh misalnya, satu ketika saya, karena kebetulan Dapil saya di Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso, saya menyeberang dari Gilimanuk menuju Banyuwangi. Di situ masih ada penumpukan-penumpukan, Pak. *Nah*, tentu Dirjen Darat juga apa namanya ASDP itu harus mencoba ada satu terobosan yang kira-kira persoalan-persoalan klasik ini yang timbul di masa-masa liburan-liburan nasional, liburan-liburan tahun baru, lebaran yang sebentar lagi kita akan menghadapinya ini sudah tidak lagi. Contoh misalnya *Ferizy*, itu sudah berulang-ulang kali di saat-saat padat justru ada apa, sistem itu tidak berjalan dengan baik, sehingga harus dilayani secara manual.

Saya pernah menyarankan di kesempatan rapat tempo hari agar juga dibuka vendor-vendor lain, tidak hanya *Ferizy*, contoh misal kalau di angkutan udara itu ada Traveloka, ada Tiket.com dan lain-lain sebagainya, sehingga juga tidak terkesan ada..., ada..., ada monopoli lah seperti itu. Dan tentu hal-hal yang harus dikedepankan menjadi prioritas adalah hal preventif, dibanding kita kuratif, dibanding kita apa namanya, pemulihan dan rehabilitasi atau..., atau apa namanya, dalam hal di pencegahan itu, yang penting, Pak, ya daripada kita melakukan kemudian rehabilitasi terhadap kejadian-kejadian ataupun kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi. Saya yakin dan percaya sebenarnya dengan koordinasi yang sangat baik, karena kebetulan di sini ada regulator dan operator itu mampu mengurai kemacetan-kemacetan yang menjadi, apa namanya, persoalan bertahun-tahun yang tidak pernah terselesaikan, yang pertama.

Yang kedua, kepada Ibu BMKG, Kepala BMKG bahwa akhir-akhir ini memang, Bu, sering turun hujan dan tentu ada dampak-dampak terhadap apa namanya, aktivitas turun hujan yang begitu deras. Di Banyuwangi satu bulan terakhir ini, yang di tahun-tahun lalu tidak pernah kejadian banjir, satu bulan terakhir itu ada banjir. Maksud saya, supaya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, tidak kemudian menimbulkan korban, ada beberapa rumah yang hanyut di Kalilo namanya, bahkan genangannya sampai 3 hari. *Nah*, kalau informasi dini ini disampaikan dan mudah diakses dengan apa namanya petugas-petugas Ibu yang di sana, ini juga bukan hanya membantu mereka di dalam berupaya untuk terhindar dari bencana-bencana alam seperti itu, ya, sehingga mereka ada kesiapan, secara mental, baik kesiapan secara apa namanya, hal lain-lain apabila banjir-banjir itu terjadi.

Yang berikutnya kepada Kepala Basarnas agar apabila ada bencana-bencana semacam ini segera responsif, Pak, tidak tinggal diam, inikan banyak personel-personel Bapak di daerah itu untuk segera terjun ke lapangan. Minggu lalu atau hari Sabtu dan Minggu, kebetulan saya di Dapil, nanti di minggu ini saya rencana mengajak personel Bapak untuk langsung terjun ke daerah-daerah bencana, guna memberikan apa, sentuhan, penghiburan kepada mereka, mungkin ada bantua-bantuan yang insidental yang kita bisa berikan kepada masyarakat yang terdampak. Yang saya

maksud, bahwa kondisi itu negara artinya hadir, Pak, walaupun tidak bisa menyelesaikan secara keseluruhan, kalau ibarat kebakaran hanya memadamkan api, karena perlu juga baik dari Kementerian PUPR, kementerian-kementerian terkait lain dalam hal penanganan banjir yang hari ini di berbagai daerah itu terjadi.

Kaitannya dengan Kakorlantas, saya kira dari sisi personil di lapangan kaitannya dengan pada saat pelaksanaan natal dan tahun baru, saya kira sudah cukup, Pak. Cuma mungkin perlu ketegasan dalam hal H-7, menjelang hari-hari besar itu betul-betul diupayakan tidak ada lagi mobil-mobil dengan bermuatan banyak, katakan lah truk maupun apa, yang trailer itu tidak masuk, terkadang mereka alasannya bahwa itu mobil logistik, akan tetapi sebenarnya bukan apa namanya, angkutan yang betul-betul mengangkut itu, sehingga itu kemudian banyak menimbulkan kemacetan-kemacetan.

Saya kira itu Pimpinan, Pak Lasarus, saya gunakan waktu cukup efektif ini, Pak, hanya dua, tiga menit.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Demikian, cukup lah ya. Ini saya pun terasa muter-muter di situ juga palingan.

Pertama, tentu Komisi V memberi apresiasi, Pak, kepada pemerintah dalam penanganan Nataru yang sudah lalu, betapa lelahnya seluruh personil yang ada di lapangan untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Kita kasih *applause*, Pak, tepuk tangan buat pemerintah ini. Ya, Komisi V mengapresiasi Pak Menteri dengan seluruh jajarannya, Korlantas dengan seluruh jajarannya, teman-teman kementerian PU yang ada di lapangan ya, dengan seluruh jajarannya, demikian juga dari Basarnas dan BMKG yang terlibat langsung dalam mengawal natal dan tahun baru ya.

Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas pengorbanan waktu, tenaga dan seterusnya oleh seluruh personil yang ada di lapangan, terutama juga dari kementerian atau induk organisasi yang terlibat dalam kegiatan ini. Demikian juga kepada seluruh *stakeholder* yang terlibat ya, baik dari maskapai penerbangan, dari Pelindo ya kemudian angkutan darat dan kereta api dan seterusnya, kami memberi apresiasi yang setinggi tingginya.

Rapat ini, Bapak-Ibu sekalian, sifatnya evaluasi, kita tidak untuk debat

kusir di sini ya. Yang pantas untuk dilakukan perbaikan dan memungkinkan dilakukan perbaikan, kami, Pimpinan dan Anggota Komisi V minta supaya itu diperbaiki, sehingga dari tahun ke tahun kita terus membaik. Pak Menteri, kita juga apresiasi kinerja Kementerian Perhubungan ya, kita bicara ini kita bicara data, Pak. Dari tahun ke tahun, kita bisa melihat, walaupun jumlah penduduk meningkat, jumlah kendaraan meningkat, tapi tingkat kecelakaan menurun, baik yang berakibat meninggal maupun luka berat dan luka ringan, itu ada kecenderungan terus menurun, itu namanya terjadi perbaikan kinerja di Kementerian Perhubungan dan kementerian terkait, terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Sebelum lebih jauh nanti mungkin ada sedikit yang perlu dijawab ya, kami mungkin. Pak Korlantas mungkin perlu dijawab soal Jambi ini, Pak, Jambi dan Pak Ridwan Bae. Maksud kita gini, ini sudah terang benderang pelanggaran yang dilakukan baik dalam konteks undang-undang sekali pun ya, sudah jelas Pak, mereka tidak boleh melewati jalan itu, tapi *kok* dalam waktu yang sangat lama ini sepertinya tidak tertangani ya, tidak tertangani, ini apa masalahnya ini? Saya sudah menyampaikan itu di sini tapi belum pernah mendengar penjelasan dari teman-teman kepolisian selaku penegak hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ini. Sudah jelas di Undang-Undang Jalan untuk kegiatan-kegiatan khusus ya, pertambangan dan seterusnya, itu mereka harus menggunakan jalan khusus, karena jalan nasional tidak dibangun untuk itu, baik dari segi muatan dan seterusnya, mungkin Pak Korlantas bisa sampaikan kepada...

F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, M.S.):

Izin, Pimpinan, sebelum ke Kakorlantas.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ya, silakan Pak Hamka.

F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, M.S.):

Pak Kakorlantas yang saya hormati,

Saya hanya menambahkan persoalan Jambi, karena saya sendiri hadir juga pada waktu itu. Intinya adalah ada proses pembiaran terhadap penegakan aturan, intinya di situ, Pak. Satu hal yang perlu dipikirkan dengan baik, pemerintah daerah, aparat dari kepolisian harus melakukan tindakan tegas terhadap itu, bahkan usulan kami pada waktu itu, hentikan pengangkutan batubara, tapi tentu tidak sebegitu drastisnya keputusan itu harus dilakukan.

Intinya adalah ada proses pembiaran dari semua aspek, termasuk, izin Pak Menteri Perhubungan, ada satu jembatan timbang di situ tidak dioperasikan, bayangkan satu-satunya andalan disitu adalah jalan nasional,

jalan provinsinya aman-aman saja, sehingga agak sulit barangkali kalau tidak ada tindakan yang khusus untuk itu.

Saya kira itu saja saya tambahkan, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Sebelum ke Kakorlantas, Pak Iwan, silakan, Pak Iwan Aras, Pimpinan.

F-GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Terima kasih, Ketua.

Pimpinan Komisi V beserta Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Menteri Perhubungan,
Ibu Kepala BMKG,
Pak Kepala Basarnas,
Dirjen Bina Marga dan Pak Korlantas Polri atau yang mewakili, beserta Jajaran yang saya hormati,

Saya pikir bahwa pembahasan Nataru ini SOP nya dari tahun ke tahun sepertinya sudah sama saja, Pak, dan *alhamdulillah* seperti apa yang disampaikan oleh Pimpinan tadi, bahwa semakin hari semakin membaik. Dan saya kira saya tidak perlu membahas lagi tentang proses kita menghadapi Nataru ataupun mudik lebaran ini karena ini sudah berulang-ulang dalam setiap tahunnya kita bahas bahkan sampai empat kali.

Yang ingin saya sampaikan mungkin hal-hal yang membuat dalam kondisi-kondisi situasional apa yang mengakibatkan kemacetan-kemacetan itu terjadi. Contoh di Sulawesi Selatan misalkan, Pak, bahwa terjadi kemacetan karena misalkan banjir yang terjadi di sana, banjir di jalan nasional yang terjadi, diakibatkan oleh sungai-sungai kita yang kemudian penanganannya belum optimal.

Nah, kemarin dalam Kunker kami di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, itu kami berharap ada tindakan untuk penanganan sungai-sungai disana, sehingga luapan air ke jalan poros nasional itu bisa... bisa dikurangi. Ini kan tidak terkait dengan persoalan Nataru saja, tapi keseharian memang seperti itu dibutuhkan.

Kemudian, Pak, memang apalagi cuaca saat ini memang sedang ekstrim, kami mengapresiasi Ibu Kepala BMKG dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat kita cukup baik, hanya saja sepertinya

belum diikuti oleh tindakan yang maksimal oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsinya. Jadi, kalau boleh Ibu Kepala BMKG lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi apabila ada peringatan dini bencana. Seperti kemarin di kota Makassar, ini baru-baru aja terjadi banjir yang cukup tinggi, bahkan sampai 1 sampai 2 meter ketinggian, itu di kota Makassar-nya, Bu, dan itu sudah diberi peringatan, tapi sepertinya terabaikan. *Nah*, ini yang kita harapkan, bahwa itu bisa menjadi *warning* buat pemerintah di daerah kalau memang Ibu memberikan peringatan yang betul-betul, mungkin selama ini yang banyak *meme-meme* Ibu ya. Jadi hanya sekedar ditampilkan, kita harapkan bahwa ada koordinasi langsung dengan pemerintah daerah.

Basarnas juga terima kasih, Pak. Bapak melakukan tugasnya dengan baik walaupun dengan keterbatasan anggaran yang sangat minim, kita lihat bahwa kinerja dari Basarnas cukup optimal, Pak.

Selain itu, kami mengajukan hal ini, Pak, Pak Dirjen Bina Marga. Kunker kami kemarin memang juga melihat bahwa di Poros Maros Makassar ini memang yang menjadi persoalan utama di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap kemacetan di jalan nasional, karena lajunya yang begitu sempit, kemudian ada beberapa jembatan di Kabupaten Maros yang memang lajunyahanya buat dua lajur *aja*, jadi, dari apa namanya. Sementara dari jalannya sendiri sudah bisa buat empat lajur, tapi jembatannya masih dua lajur. Ini semua penyebab-penyebab kemacetan, bukan hanya pada saat Nataru atau pada saat mudik lebaran, tetapi setiap harinya seperti itu.

Selanjutnya, Pak, tadi banyak disampaikan Pak Menteri menyangkut masalah Jambi. Kebetulan waktu ke Jambi itu kami yang pimpin, Pak, Kunkernya, namun betul apa yang disampaikan bahwa jembatan timbang tidak berfungsi optimal, kemudian, kepolisian tidak bersikap sebagaimana mestinya, Pak Kakorlantas. Kami harapkan ada penertiban dan bahkan kami berpikir dari pihak PUPR, dalam hal ini balai juga melakukan pembiaran, tadinya seperti itu, sehingga kami minta dari pihak Kementerian PUPR untuk bersurat kepada Kapolri ataupun Korlantas, agar supaya penindakan kegiatan penambangan yang menggunakan jalan nasional di Provinsi Jambi ini bisa dikendalikan, Pak. Minimal ada pembatasan dan minimal untuk *overload over dimension*-nya itu bisa diturunkan, Pak, karena itu sangat berpengaruh terhadap pemeliharaan jalan nasional kami disana, bahkan ada 300 kilometer kalau saya *enggak* salah yang dipergunakan untuk pekerjaan tambang ini.

Nah, ini 300 kilometer dan total kebutuhan biaya untuk membenahi itu sebesar 1,2 triliun, Pak Kakorlantas. Sementara, PNBP yang dihasilkan oleh penambangan tersebut hanya 500 miliar. Jadi *profitable*-nya dimana? lantas yang terjadi di sana, masyarakat kita sangat terganggu, bahkan mereka tidak mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak mampu dibawa sampai ke rumah sakit akibat kemacetan yang ada. Saat ini laporannya yang kami terima ada 10.600 truk yang beroperasi disana, yang kalau dijejer itu lebih dari 50 kilometer memenuhi jalan nasional, Pak.

Nah, ini Pak Menteri Perhubungan, mohon izin, Pak, seperti yang Pak Hamka sampaikan, jembatan timbang Bapak di sana kayak jembatan hantu, karena *enggak* ada yang masuk ke situ, mobil-mobil itu. Saya *enggak* tahu apa alasannya kenapa mobil-mobil ini kemudian bisa lolos begitu saja, kemudian dari pihak Polres ataupun Polda, kenapa tidak bisa menindaki hal itu, karena ini kan ada Undang-Undang Jalan yang mengatur tentang hal itu Pak Korlantas, mudah-mudahan Pak Dirjen Perhubungan Darat, Pak Kapolda, mantan gubernur mengerti untuk mengetahui kondisi itu. Saya kira ini bisa segera mendapatkan perhatian.

Pak Dirjen Bina Marga, saya juga terima kasih untuk *bypass* Maminasata itu sudah teralokasikan di tahun anggaran ini. Namun, mau saya sampaikan disini itu baru menjadi solusi untuk memecah kemacetan di Makassar Maros, Pak, karena poros yang macet itu sebenarnya poros Makassar Maros-nya bukan Maros Pangkep-nya. Jadi kami ingin bahwa program ini tetap dilanjutkan sampai kemudian menjadi jalan alternatif untuk masuk dari daerah utara Provinsi Sulawesi Selatan masuk ke Kota Makassar.

Mungkin itu aja Pimpinan dari kami.

Terima kasih atas waktunya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Dinda Iwan.

Pak Robert, silakan.

F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Ya, terima kasih.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Saudara Menteri Perhubungan,
Teman-teman di PUPR yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Bina Marga,
Ibu Kepala BMKG, Kepala Basarnas dan Kakorlantas, dan
Seluruh jajaran yang hadir,

Yang pertama, saya berikan apresiasi kepada Ibu Kepala BMKG, karena kemarin saya pimpin kunjungan spesifik di daerah Cikeas. Itu masyarakat mengucapkan terima kasih karena ada rekayasa cuaca kemarin, maka mereka bisa terhindar dari banjir kemarin. Mereka tahu benar itu bahwa ada rekayasa yang dilakukan oleh BMKG.

Nah, saya ingin tanyakan Bu, di dalam anggaran Ibu yang begitusedikit, kira-kira rekayasa itu sekali dilakukan itu, berapa besar dana yang dibutuhkan? ya. *Nah*, menurut saya, ini harus kita mendukung ini, karena ya berarti teknologi sudah bisa dapat membuat satu rekayasa untuk menghindari apa, banjir-banjir di daerah-daerah yang memang selama ini belum bisa tertangani dengan baik, karena infrastruktur yang ada belum mendukung, iya kan, karena itu membutuhkan biaya yang besar dan harus partisipasi, bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi ini belum bisa jalan dengan baik.

Maka jalan satu-satunya melalui BMKG untuk bisa merekayasa hujan itu bisa dipindahkan ke laut. Saya kira Jakarta pun tertolong dengan rekayasayang BMKG lakukan, maka saya ingin tahu berapa besar anggaran ini diperlukan untuk sekali rekayasa. Terima kasih untuk seluruh jajaran BMKG.

Yang berikut, saya ingin sampaikan, karena ini Nataru, kepada teman-teman, khususnya Dirjen Bina Marga, karena yang pasti kami di Papua ini memerlukan jalan trans Papua, karena natal ya, kami disana sangat berdampak besar terhadap kebutuhan pokok yang ada di, terutama di daerah-daerah pegunungan yang belum bisa terlayani dengan angkutan darat yang sangat, yang agak murah daripada angkutan udara. Jadi, mohon Pak Dirjen yang mewakili menteri untuk bisa, harapan saya, 2024 nanti trans Papua, Jayapura, Wamena ini bisa betul-betul bisa layak dipergunakan agar terjadi penurunan kemahalan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat di daerah kami. Jadi saya kira itu.

Yang berikut, saya terima kasih ke Saudara Menteri Perhubungan, bahwa di daerah kami, daerah-daerah yang terpencil itu dengan program subsidi angkutan udara, saya kira ini perlu, saya minta ditingkatkan, karena masih banyak daerah yang memerlukan itu dan itu sangat berdampak baik kepada masyarakat ya, dengan subsidi angkutan udara di ini. Terima kasih untuk pemerintah ya, saya memberikan apresiasi juga kepada Korlantas yang sudah bisa merekayasa lalu lintas menjadi masyarakat pengguna jalan dan apa, angkutan itu bisa nyaman, kita lihat kemarin penurunan angka kecelakaan korban ini sangat-sangat baik. Jadi kami berikan apresiasi, kepada Basarnas pun demikian, bahwa kami lihat bencana yang ada, Basarnas sudah, walaupun dengan keterbatasan, ya anggaran, peralatan dan sebagainya, tapi dengan semangat ke-Indonesia-an, semangat untuk kemanusiaan, saya kira ini yang menjadi semangat itu yang buat Basarnas itu selalu hadir ditengah-tengah masyarakat.

Saya kira itu, Pimpinan.
Kami kembali kepada Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Demikian pendalaman sudah selesai, baik dari Anggota maupun Pimpinan Komisi V, saya tidak melakukan pendalaman lagi ya. Mungkin ada 2 hal penting, Pak Menteri dan Pak Kakorlantas, yang kalau tidak dijawab ini akan terus menjadi pertanyaan di komisi ini, dan kami akan terus didatangi orang.

Pertama Pak menteri, soal Sriwijaya, mungkin nanti Pak Menteri bisa disampaikan kepada kami. Kenapa ada syarat dari Sriwijaya yang katanya syarat dari asuransi mencantumkan ada persyaratannya, harus membuat pernyataan untuk tidak menuntut pihak manapun, baru santunan itu boleh dibayar, *gitu* loh. Kan kalau bicara tidak menuntut, tidak menuntut inikan proses negara hukum, saya rasa semua negara, warga negara berhak, enggak boleh dihalangi, nanti kan hukum yang mengujinya, proses hukum yang mengujinya, itu yang kami pahami, sehingga juga keberatan, pengacara mereka juga berulang kali menemui kami di komisi ini dan kami tidak bisa menjawabnya. Nanti Pak Menteri tolong dijelaskan.

Kemudian Sriwijaya sudah datang belum? Ya, ada Sriwijaya di belakang. Tempo hari saya telepon Sriwijaya, bahwa menurut Sriwijaya itu yang mensyaratkan itu adalah asuransi, maka ini saya pernah ngomong, *kok* asuransi ini *kok ngatur-ngatur* kita, ini negara hukum, kita tunduk kepada pemerintah, tidak tunduk kepada pihak manapun. Aturan yang dibuat oleh pemerintah, semua pihak harus menyetujuinya, harus melaksanakannya.

Kemudian yang kedua, yang perlu dijawab, Pak, dari Kakorlantas, soal Jambi, Pak, juga tidak akan selesai masyarakat komplain ke komisi, ini karena sudah terbuka ya, kalau juga ini tidak ada jalan keluarnya. Sama tadi juga dengan di tempat Pak Ridwan Bae tadi, ini Pak Ridwan Bae sampaikan ini sebelas, dua belas kasusnya ya, mobil yang harusnya jalan khusus, tapi menggunakan jalan umum.

Tadi sudah disampaikan dari hasil investigasi Komisi V, bahwa ada 300 kilometer jalan nasional yang terdampak. Ada sepuluh ribu lebih kendaraan yang terlibat dalam kegiatan ini. Kami tahu ini masalahnya tidak mudah, menjadi tidak mudah, karena kita lambat, Pak. Ya, kita tidak mengambil langkah yang harusnya kita ambil pada waktunya, *gitu* loh. Padahal kan, ya kalau saya, Dinda Iwan, saya nggak perlu menunggu Pak Kementerian PUPR membuat surat kepada Korlantas, baru Korlantas atau Menteri Perhubungan mengambil tindakan, kenapa? Ini kalau dalam kategori hukum, Pak, ini termasuk bukan delik aduan, Pak, ini pidana murni ini, ini tidak perlu diadukan, kategorinya ini pidana murni, Pak, bukan delik aduan ini, karena tindak pelanggaran itu nyata di depan mata, terbuka di depan publik,

ada pihak yang dirugikan, ada, ada pihak yang diuntungkan, ada, *ndak* masalah ngambil keuntungan kalau tidak merugikan pihak lain. Maka, di Undang-Undang Jalan itu dibuat boleh melakukan kegiatan pertambangan dan diangkut melewati jalan khusus, kan begitu aturan mainnya. Kenapa harus jalan khusus? supaya nanti ketika itu diangkut, tidak ada pihak lain yang dirugikan ketika ada pihak lain mengambil keuntungan, kan itu tata cara kita bernegara.

Oleh karenanya, Pak, biar kami mendengar langsung, saya persilakan yang pertama dari Menteri Perhubungan ya, baik soal Sriwijaya maupun soal Jambi dan nanti mungkin harus dipertegas kembali oleh dari Korlantas, seperti apa ini duduk persoalannya dan bagaimana kita menyelesaikan masalah ini.

Saya persilakan, Pak Menteri sekalian Bapak nanti saya pikir kita enggak perlu panjang-panjang yang lain cukup tertulis saja karena kan ini kan sifatnya evaluasi. Namanya evaluasi kan butuh waktu untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Saya persilakan, Pak menteri.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (IR. BUDI KARYA SUMADI):

Terima kasih, Pak Ketua.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Berkaitan dengan Sriwijaya, pada dasarnya secara internasional tidak ada keharusan untuk melepaskan hak atau *release and charge*. Nah, oleh karenanya saya mengusulkan satu rekomendasi, bahwa Sriwijaya memberikan satu penyelesaian asuransi tanpa surat pernyataan. Jadi kami sudah melakukan penggantian...

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, tegas Pak Menteri. Ini publik semua menyimak pembicaraan, Pak Menteri.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (IR. BUDI KARYA SUMADI):

Ya.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Terima kasih, Pak Menteri.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (IR. BUDI KARYA SUMADI):

Satu.

Yang kedua, Pak, secara khusus kami sudah memanggil gubernur, Kapolda, Ketua DPR Jambi, kemarin, Pak, dengan Menteri ESDM. Memang ada dilema tentang kesewenangan daripada pemilik batubara untuk menggunakan itu, sudah diberikan solusi untuk siang dan malam, tetapi tetap saja macet. Ada kesimpulan akhir yang kita dapatkan, bahwa jalan yang terbaik untuk mereka adalah satu membuat jalan, yang kedua menggunakan air atau sungai. Sungai memang agak mahal, karena ada satu penanganan yang berlebihan, tetapi jalan tidak ada alasan. Jalan ini dibuat di semua tempat, di Sumsel, di Kalsel, Kaltim, Kalteng semuanya itu.

Nah, oleh karenanya, gubernur berjanji untuk memberikan surat teguran, Februari terakhir, dalam hal mereka memberikan hak untuk membuat jalan khusus itu, tidak melakukannya, maka ini bisa di berikan pada yang lain dan untuk diketahui, Pak, pembuatan jalan itu menguntungkan, sebenarnya. Jadi saya sempat menyatakan pada akhir rapat, dan *Insyah Allah* ini ditindaklanjuti dan saya secara tegas menyampaikan ini pada Pak gubernur dan juga minta kepada polisi, Pak Kapolda untuk melakukan *law enforcement*.

Nah, kalau mengenai jembatan timbang ini memang susah, Pak. Jembatan timbang itu kami cuma berkuasanya di dalam, kita *nggak* boleh *stop*, jadi saya pikir *nggak* menyelesaikan masalah. Jadi yang menyelesaikan masalah, mereka harus membuat dua pilihan: lewat air, kalau mahal lewat jalan. Jalan menurut Pak Dirjen, itu tidak dibutuhkan izin atau Amdal dari pusat. Itu adalah jalan provinsi yang relatif mudah sebenarnya dilaksanakan.

Demikian, Pak, dari saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Pertama hal penting, saya rasa yang Pak Menteri sampaikan itulah solusinya. Untuk Sriwijaya tegas, Pak Menteri menganjurkan segera diselesaikan. Hadir Pak Sriwijaya disini, Pak ya, karena tidak ada aturan internasional yang disampaikan oleh Pak Menteri yang mensyaratkan akan hal itu. Ini soal yang satu ini susah kita ngomongnya, Pak. Ini bisa kena kepada siapapun, ini ya, kepada siapapun bisa mengalami situasi yang dialami korban yang hari ini, ya. Soal menuntut itukan ada pengadilan, Pak. Negara hukum itu memberi kebebasan hukum kepada semua orang, selama dia menggunakan dalil-dalil yang diatur oleh hukum. Jadi *ndak* boleh itu menghalangi untuk mendapatkan hak yang sudah diputuskan oleh

pemerintah ya. Kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia tunduknya kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur di luar itu, ya *enggak* perlu kita ikuti.

Saya harap Sriwijaya disini, Pak, ya. Tolong, Pak Sriwijaya hadir untuk segera menyelesaikan kepada seluruh keluarga korban, kalau memang hak warisnya sudah jelas, tidak lagi mensyaratkan permintaan asuransi yang mengatakan harus menandatangani surat pernyataan bahwa tidak akan menuntut pihak manapun. Kita tahu, Pak, ada kepentingan siapa ini, tidak menuntut pihak manapun ini. Kita tidak usah halangi, siapapun lah, termasuk mungkin mau nuntut Komisi V, silakan. Misal *gitu* loh, Pak, ya, ini misal, silakan, kita jangan halangi, itu hak hukum semua orang, itu Pak supaya *clear* Pak Sriwijaya.

Jadi kami tidak akan lagi buka persoalan ini di komisi ini, Pak, berharap nanti Bapak kembali dari ruangan ini, persoalan terkait dengan santunan kepada warga korban kecelakaan Sriwijaya beberapa waktu yang lalu, sudah bisa segera diselesaikan. Rapat ini dimonitor, Pak, ditonton, karena ini *live* ya, semua masyarakat bisa melihat apa yang kita putuskan hari ini, dan apa yang tadi Pak menteri sampaikan.

Termasuk juga soal Jambi, Pak menteri sudah sampaikan tadi, sudah memanggil berbagai pihak ya, yang terkait, *stakeholder* terkait untuk penyelesaian, baik gubernur, Ketua DPRD, kemudian dari korlantas dan dari ESDM ya, solusinya ada, bukan tidak ada, sungai atau buat jalan khusus, itu.

Nah, saya rasa toleransi ini sudah pemerintah berikan lama, Pak. Tadi PNBPNya 600, 500 miliar, 500 miliar lebih, Pak. Sementara dana yang diperlukan kurang lebih 1,2 triliun, ini negara sudah rugi, Pak, sudah rugi 700 miliar-an, 700 miliar ini kalau untuk kita bikin jalan di tempat lain tanpa kita rusak, Pak, berapa banyak infrastruktur bisa kita tingkatkan. Ini kerugian negara sudah terjadi ini, siapa yang tanggung jawab. Apakah? nanti setelah ini selesai, ada jalan keluar, perusahaan tambang ini mau mengeluarkan duit untuk memperbaiki jalan itu, belum tentu ini.

Oleh karenanya, kita ingin dengar dari Korlantas, apa kendala penegakan hukum di Jambi ini dan tempat-tempat lain yang serupa lah.

Kami persilakan Pak Ery dari Korlantas.

DIREKTUR KEAMANAN DAN KESELAMATAN KOORDINATOR LALU LINTAS POLRI (BRIGJEN POL. ERY NURSATARI, M.H.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri, berkaitan dengan permasalahan Jambi, angkutan batubara, memang ini masalah *complicated* yang memang sudah lama. Mungkin pada saat dulu, harga batubara tidak apa, tidak tinggi mungkin ya, tidak terlalu banyak yang

angkut. Sekarang kita tahu dengan adanya harga batubara tinggi, akhirnya semua orang berlomba-lomba ya, kita enggak tahu, apakah itu berizin atau tidak berizin, kita lihat, tapi yang tadi langkah Pak menteri, memang saya juga dapat informasi. Kemarin saya juga sempat ketemu sama Pak Kapolda Jambi, Pak Rusdi, menanyakan masalah itu.

Jadi, memang Pak kapolda juga bersama Pemda juga, sesuai apa yang dikatakan Pak menteri juga, sudah terus berpikir untuk ini, karena memang ini kewenangan adalah di pemerintah daerah. Kita juga harus membantu gimana caranya, karena masalah ini masalah yang harus kita pecahkan bersama. Kalau soal penegakan hukum, ya, ya saya rasa bisa kita lakukan, tetapi kalau umpamanya penegakan hukum juga tidak ada solusinya, ini akan juga menghambat, karena mereka kan dulu pernah kita coba juga, akhirnya unjuk rasa, nutup jalan panjang, akhirnya berita nasional segala macam, terus kita yang berhadapan dengan mereka, bukan kita takut, tapi gimana caranya *win-win solution* ini harus kita pecahkan bersama, *entah* pengaturan batas tonase itu harus diatur, kemudian juga perlakuan jam dia berjalan pada saat, tidak pada saat apa, padat, ataupun kemudian juga ya ini jalan khusus itu. Itu yang memang harus kita pecahkan bersamaan. itu yang memang harus kita pecahkan bersama, dan ini tugas kita bersama. Tugas kita bersama, tidak, hanya Kepolisian, tapi ya semua. Pemerintah daerah kita juga yang di pusat ikut memikirkan supaya ada solusinya. Kami berharap ini bisa berjalan, dan kami akan tetap memberikan petunjuk arahan ke Polda Jambi untuk diatensi betul-betul, supaya permasalahan ini bisa diselesaikan Pak dengan baik, ada jalan keluar, ada rekomendasinya, gimana aja yang terbaik supaya jangan sampai menjelang itu dibikin jalan baru ya, gimana caranya. Kemudian atau lewat air, sungai, sungai Batanghari memang banyakyang surut juga, saya lihat dulu, saya pernah dinas di sana juga, Pak, pernah bertugas di sana juga, jadi sedikit banyak tahu tentang Jambi.

Kemudian yang kedua, Pak. Saya jawab berkaitan dengan nomer rahasia tadi, ada yang nanya RF, Pak ya, yang dari Lampung, Pak. Saya juga dari Lampung, Pak, sama Pak. Jadi memang sekarang lagi moratorium, Pak ya, harap sabar, karena banyak ya, yang malsukan, banyak dipalsukan, banyak yang sewenang-wenang, banyak yang ya, akhirnya kita juga menjadi *boomerang* untuk kita. Jadi kita lagi tertibkan dulu, nanti kalau sudah tertib, ya akan kita, mungkin ya enggak begitu lama kan kita keluaran lagi untuk tentunya dengan kehati-hatian dan, dan, ya kita harapkan ini betul-betul lah rekan-rekan yang menggunakannya juga digunakan dengan baik.

Itu saja, Pak.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-GERINDRA (IR. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Izin Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ya, sebentar-sebentar.

Pak Iwan, yang yang mimpin ke Jambi, mau nanggapi Pak yang dari Kakorlantas, setelah itu Pak Eddy Santana.

Silakan, Pak Iwan.

F-GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Izin ya, Pak Eddy ya.

F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):

Interupsi sebentar, Pak ya.

F-GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Yang pertama Pak Menteri...

F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):

Pak Iwan, Pak Iwan, sebentar Pak, sebentar, sedikit sekali, supaya nyambung.

F-GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Minta izinnnya sama Pak Lasarus, Pak, bukan saya.

F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):

Oh iya.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Pak, sebentar Pak, nanti saya kasih Bapak, pasti nyambung kalau Pak Tamanuri, tenang aja.

Silakan, Pak Iwan.

F-GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Ya, mohon maaf Pak, agak terganggu Pak Menteri,

Saya tadi kalau persoalan jembatan timbang ini hanya berkuasa di dalam. Saya minta kalau berkuasa di dalam, berarti truk-truk *overload over dimension* ini boleh lewat tanpa harus masuk ke dalam jembatan timbang, itu saya kira gunanya menjadi enggak ada jembatan timbang ini. *Nah* sekarang kalau memang harus masuk yang mengharuskan masuk itu siapa? Apakah dari pihak kepolisian atau dari pihak Kementerian Perhubungan? Kalau dari kepolisian, ya itu PR buat Pak Kakorlantas lagi, kemudian.

Selanjutnya, Pak menanggapi apa yang Pak Korlantas sampaikan, bahwa kita harus mencari *win-win solution*. Kalau untuk saat ini, saya kira *lose, win-lose solution*, Pak yang terjadi, penambangnya *win*, negara *lose*, masyarakat *lose*, itu bukan *win-win solution*. Kalau persoalannya kita harus mencari jalan lain, bahwa harus dalam *holding* dibangun, harus lewat sungai, kalimat inikan bukan kalimat baru saja, kalimat ini sudah bertahun-tahun disampaikan seperti itu. Lantas sampai kapan kita memberikan toleransi untuk hal ini ya, kan ini juga perlu dipertegas, Pak. Maksud saya apa kesulitannya? walaupun iya, jangan semua lah, Pak, toleransinya sedikit- sedikit diturunkan, jangan dibiarkan terus-menerus seperti ini.

Jadi, kalau persoalannya seperti, kemudian seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menhub tadi sudah memanggil gubernur akan melarang, gubernur bisa melarang di jalan provinsi, di jalan nasional tidak dilarang sama Pak gubernurnya. Yang kami masalahkan di sini, di Komisi V, kami nggak berurusan dengan penambangannya, kami berurusan dengan penggunaan jalan nasional yang menjadi kewenangan atau domain Komisi V, yang mana uang negara masuk di situ untuk membangun atau memperbaiki itu. *Nah*, selain daripada kerugian negaranya, masyarakat kita *ndak, ndak* mendapatkan pelayanan yang maksimal, Pak, polusinya kena, untuk layanan kesehatan *enggak* ada dan lain sebagainya. *Nah*, kalau Bapak sendiri tidak bisa menyelesaikan, kira-kira siapa yang bisa selesaikan, ini domainnya siapa, yang memberikan perhukuman, kan ada di kepolisian, saya kira seperti itu Pak.

Jadi, kalau persoalannya mereka demo, bagaimana yang mendemo juga masyarakat kita demo, bagaimana truk-truk ini lalu lalang, masyarakat saya juga demo. Sekarang demo yang mana yang Bapak mau lihat, demo dari perusahaannya atau demo dari masyarakat kita. *Nah*, kita harus berpihakke masyarakat, Pak, *gitu* loh.

Jadi, kalau solusi yang Bapak sampaikan hanya seperti itu, kami ada langkah konkret, Pak. Bapak kasih batasan, kapan mereka bisa maksimal menggunakan jalan nasional ini. Mereka harus mempunyai niat baik itu, bangun jalan *holding*, jalan sendiri, karena ini menguntungkan mereka *gitu* Pak. *Nah*, kalau itu tidak di-*pressure* ke situ, Pak, jangan harap, Pak, pasti tetap akan jalan nasionalnya akan dipakai terus menerus.

Mungkin itu, Pak Korlantas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Pak Eddy, nanti saya akan tambah dikit.
Pak Eddy Santana, silakan.

F-GERINDRA (IR. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi langsung saja, saya karena ikut juga Kunker ke Jambi, itu ya dan saya melihat memang ini harus ada, ada program yang terintegrasi, *gitu* ya. Jadi betul kata Pak mewakili Kakorlantas, bahwa sebetulnya ada sungai Batanghari, Pak. *Nah*, sungai Batanghari ini, saya sudah diskusi juga dengan Kepala balai wilayah di sana, SDA ya. Artinya jalan satu-satunya itu yang terbaik adalah melalui sungai, hanya sungai ini adalah kendala Pak, *nah*, ini PU, Pak. Kendalanya ya, tadi karena banyak kelokan-kelokan, ada *minding* istilahnya itu, jadi ada sedimentasi banyak itu. *Nah*, itu dulu diselesaikan itu untuk PU ini, ya. Untuk PUPR mungkin programnya itu, tentu ada kaitannya dengan daerah. *Nah*, kemudian ada lagi kendalanya jembatan, Pak, adaberapa belas jembatan, 13 atau berapa 16, hanya ada dua, Pak yang *clearance*-nya itu rendah itu untuk tongkang melewati, yang lain tinggi, Pak, jadi hanya ada 2. *Nah*, ini kan bisa, bisa juga dikendalikan atau dibuat suatu program, jadi ini sementara enggak usah lewat jembatan rendah, tapi melewati itu, *gitu*, yang bisa dipakai dulu.

Nah, mau tidak mau ini ada pengalaman di Sumatera Selatan memang seperti itu, Pak, ribuan truk ya, melalui jalan nasional, jalan provinsi, tapi setelah ada jalan khusus tambang, itu gubernur juga membuat surat keputusan untuk tidak boleh, dilarang melewati jalan, baik itu jalan nasional maupun jalan provinsi-kabupaten, *nah*, ini, ini.

Jadi memang harus ada solusi cepat, hanya itu kan perlu waktu. Jangka pendek, mungkin Pak Kakorlantas nanti, Pak Kakorlantas itu jangan dibiarkan ribuan truk seperti itu, Pak, memang kita sudah ini. Tadidisampaikan, bahwa harga batubara ini tinggi, Pak, keluar lah, *loh* waktu batubara rendah, enggak ada truk, *gak* apa-apa juga. Artinya memang ada sesuatu disitu mungkin, sekarang sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, ada supir dan sebagainya, ya diatur lah, Pak. Jangan ribuan, dibatasi batubara keluar, mungkin hanya 200-300 truk aja yang bisa, yang boleh, *gitu* diperbolehkan. *Nah*, ini saya kira dari kemauan kita, niat kita untuk melakukan, membuat suatu aturan atau mempertegas aturan yang sudah ada, kita bisa tegas, saya kira bisa dilakukan itu, itu saja.

Terima kasih, Pak.

Saya kira itu.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Pertama saya ingin sampaikan.

F-GERINDRA (IR. SUMAIL ABDULLAH):

Interupsi sedikit Pimpinan, ada yang sangat penting mau saya sampaikan, izin satu menit saja.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Kalau bisa kurang dari satu menit, silakan.

F-GERINDRA (IR. SUMAIL ABDULLAH):

Baik.

ini saya apa namanya, arahkan...

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ya, sebentar-sebentar, Pak. Pak Tamanuri interupsi duluan tadi. Silakan Pak Tamanuri. Habis Pak Tamanuri, Pak Sumail.

F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Ini yang saya suka sama Pimpinan, kita ini.

Saya menindaklanjuti apa yang Bapak sampaikan Bapak.

Jadi kami yang sudah habis sekarang ini, solusinya gimana ini, RF nya itu. Jadi dikhususkan dulu lah kami yang Anggota Dewan ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Oh, ini soal RF. Saya tadi nyari apa RF ini, sudahlah enggak usah pakai RF, Pak, biasa aja kita, saya aja enggak pakai Pak, ngapain, macet

juga, enggak usah, Pak. Saran saya, enggak usah, Pak, pakai yang nomor umum aja kita.

Kita kasih contoh kepada seluruh rakyat, susah sama susah, senang sama senang, setuju? itu, enggak usah minta *previlege* kita, Anggota DPR ya, enggak usah, enggak usah minta *previlege*. Kita sudah punya nomor *anu* kita, nomor Anggota punya kan, sudah ada, *ngapain* minta RF lagi, sudah ada, *gitu* loh, kalau itukan Polisi kasih, nomor Anggota, belum dicabut kan Pak Korlantas yang nomor Anggota DPR punya? *Nah, enggak*, masih ada, RF enggak usah lah.

Baik.

Pak Sumail singkat, Pak, ya.

F-GERINDRA (IR. SUMAIL ABDULLAH):

Baik.

Ini kaitannya juga keselamatan, kelancaran transportasi, Pak Dirjen Bina Marga. Itu di jalan nasional, tepatnya di kecamatan Plosorejo, Pak, ada 4 paket jembatan, yang sudah 2 tahun ini, Pak, darurat dan banyak menelan korban jiwa, karena sering terjadi kecelakaan, sudah pernah dilelang tahun lalu.

Saya koordinasi dengan Ka.balai jalan yang ada di Jawa Timur, itu katanya penyedia jasanya lari, Pak, digarap sebagian, terus kemudian tidak bertanggung jawab dan melarikan diri. *Nah*, tentu ini harus segera evaluasi juga kaitannya dengan pemenang-pemenang lelang itu. Mereka mungkin ingin mendapatkan pekerjaan ditawarkan 70%, kejadiannya seperti ini lah, Pak, keluhannya masyarakat sudah luar biasa disampaikan kepada kami. *Nah*, ini mendekati lebaran, bila bisa itu segera dikerjakan sebelum apa namanya, libur Idul fitri yang akan datang.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Saya rasa cukup.

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Pak Ketua, interupsi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Saya sebenarnya dari tadi tunggu Pak Bakri bicara, saya takut ada apa Pak Bakri hari ini. Iya, Bapak ini bikin *troublemaker* jadi kita.

Saya persilakan Pak Bakri.

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Ya, baik.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan yang saya banggakan beserta seluruh Saudara-Saudara saya Anggota Komisi V,
Pak Menteri,
Pak Dirjen,
Pak Kakorlantas, dan BMKG, Basarnas, PU,
Semuanya dah,

Pertama-tama, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Lasarus ini sahabat saya, kita sudah hampir 3 periode, disini Pak. Jadi terima kasih sudah *support*-nya kepada Jambi, terus Pak Andi Iwan, Pak Hamka, Pak Ridwan, Pak Eddy Santana, dan tentu juga seluruh kawan-kawan yang sudah dari kemarin-kemarin memperhatikan tentang Jambi.

Saya, H. Bakri, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, daerah pemilihan Provinsi Jambi. Memang saya merasakan, Pak, merasakan sekali bagaimana jeritan hati masyarakat Provinsi Jambi disana yang terkadang-kadang ada yang sakit diangkut pakai ambulans, tidak sampai, meninggal, dan itu sudah sering, bukan satu, dua. Sering sekali meninggal di jalan, karena dari kiri ke jalan, sudah tidak bisa.

Yang kedua, masyarakat yang biasanya bisa mengangkut sayur-sayuran dari daerah wilayah barat Kerinci, Merangin, Sungai Penuh ke Jambi sudah tidak bisa lagi, karena mereka datangnya jalannya lewat malam, sementara malam itu 2 arah sudah tertutup, bukan 10 ribu, Pak Ketua, konon kabarnya hampir 15 ribu, Pak, kendaraan disana, jadi memang sudah terlalu.

Nah, jadi banyak hal memang, Pak, sudah itu akhir-akhir ini juga *supply*. Saya dengar kawan-kawan dari Migas juga sekarang sudah mengeluh, angkutan bahan bakar juga sudah mengeluh. Jadi semua mengeluh, Pak, boleh dikatakan semua terganggu. Baru-baru ini Bapak Walikota Provinsi Jambi itu membikin surat, menginstruksikan kepada

kendaraan-kendaraan yang beberapa hari itu masuk dalam kota sudah, Pak, masuk ke dalam perumahan, Pak. Yang mirisnya itu dikawal, karena malam tidak kelihatan siapa yang kawal, warnanya *ndak* tahu, *ndak* kelihatan, Pak, itu sudah Pak, sudah masuk dalam kota, jadi sudah anarkis sekali. *Nah*, sengaja Pak Ketua, saya tidak bisa bicara pertama-tama, saya pingin kawan- kawan betul-betul cerita itu.

Nah, kemarin memang...

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Pak coba diperjelas *loh*, dikawal sama siapa, Pak?

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Ya, enggak kelihatan Pak karena melalui...

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ya, masa enggak kelihatan, kelihatan *dong*.

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Macam-macam, Pak, macam-macam.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Komisi V yang kawal?

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Tidak.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Oh, tidak.

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Kalau Komisi V tentu tidak.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Atau BMKG yang kawal?

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Tidak lagi.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

*Oh, tidak juga. Terus mana dong?
Siapa tersangkanya di depan ini?*

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Oh, kalau disini enggak ada orangnya Pak, orangnya tidak ada disini Pak, kalau orangnya tidak ada disini, Pak, kalau orangnya tidak ada.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Udahlah kita tanya sama rumput yang bergoyang saja, kalau gitu, Bapak enggak usah bahas kalau enggak jelas.

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Jadi gitu, jadi memang sampai-sampai walikota bikin surat, karena sudah masuk ke perumahan-perumahan itu. Jadi bukan hanya jalannya nasional hari ini, Pak, jalan kabupaten pun hancur, jalan provinsi hancur, karena lagi tren batubara ini naik. Nah, kemarin saya karena ditelfon, saya sebenarnya tidak diundang, Pak, tapi saya ditelpon oleh Pak Menteri Perhubungan, Pak Bakri ada di Jakarta? ada, bisa berkenan hadir? Saya hadir. Nah, di rapat itu memang Pak Menteri menyampaikan bahwa dibatasi kendaraan, sekarang hanya boleh empat ribu, itupun siang malam, empat ribu, sudah itu tonasenya harus dikurangi, menyesuaikan dengan kemampuan jalan, begitu.

Nah, jadi yang menjadi permasalahan saya hari ini, ketegasan daripada kita semua, apakah ini terus menerus begini atau bagaimana? kalaupun jujur, Pak, ditanya, jujur, ya stop tidak boleh melewati jalan nasional titik, sudah ada undang-undangnya kok. Besok, Pak, akan ada demo besar-besaran di provinsi Jambi, akan ada demo besar-besaran. Nah, mereka hanya percaya dengan Komisi V. Saya bilang DPR RI Komisi V, DPR RI nya saya bilang, mereka sudah tidak percaya dengan si A, si B.

Nah, oleh sebab itu saya berterima kasih hari ini masih disuarakan, saya berharap ini terus kita suarakan selagi tidak ada, apa tindakan-tindakan yang tegas, yang signifikan. Saya berharap kawan-kawan tidak selesai menyuarakan ini sampai betul-betul bisa, karena kata Pak Dirjen Darat ini dulu sudah pernah mau dibikin jalan khusus, tapi karena batubaranya turun, stop, ini batubara naik.

Nah, kalau mengikuti ini Pak, hancur jalan, Pak. *Nah*, jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Pimpinan dan juga Anggota-Anggota yang lain yang sudah hadir kemarin. Dan tentu, Bapak- Bapak yang di depan yang bisa menentukan kebijakan untuk melaksanakan dengan tegas, sehingga betul-betul apa yang menjadi permasalahan di Jambi itu betul-betul bisa diselesaikan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Pak Bakri ini ngomong separuh-separuh, *gak* nyambung saya. Iya, *to the point* saja, Pak Bakri, kita punya hak imunitas di sini ya, karena selama kita tidak jujur, Pak, masalah tidak akan pernah selesai, itu semboyan hidup saya, Pak. Selama kita tidak jujur, masalah tidak akan pernah selesai. Karenakita berusaha menutupi masalah itu dengan masalah yang baru, dengan kebohongan-kebohongan yang baru, dengan kamouflage-kamouflage yang baru. Saya kira ini sudah terang benderang, Pak. Seharusnya saya enggak mau ngomong ini Pak Menteri, *males* saya ngomonginya, karena akan nabrak kepentingan banyak orang, tapi kami enggak kuat juga di komisi ini, Pak, didatangi dari mulai sopan sampai marah kesini. Kami ini enggak punya hak eksekusi, kalau saya punya pasukan, Pak, dijamin 1000%, saya lebih baik mundur, Pak, kalau saya tidak bisa *nyetop* itu jalan, mundur Pak, bener, Pak, bagus saya mundur melaksanakan tugas negara *kok* kita, kan negara sudah ngatur, kenapa perlu jalan khusus, karena kalau tidak ada jalan khusus, ada pihak lain yang dirugikan.

Saya cek ini tambang dari tahun berapa? dari tahun 2015, sudah 7 tahun, mau kapan bikin jalan kalau begini. Memang niat enggak ada. Kalau saran dari Pak Korlantas tadi bukan jawaban, Pak. Jujur saja, saya tidak ingin mendengarkan jawaban Bapak yang tadi seperti itu, sebetulnya. Kami sampai berdiskusi disini, jangan dikira kita enggak ngerti masalah di lapangan, Pak Korlantas, ngerti kita. Saya ngerti kesulitan Bapak, kita ngerti, Pak, tapi itu saya bilang tadi, Pak, biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Itu prinsip kita bernegara hukum, Pak. Kalau sudah sampai pada titik tertentu, toleransi kita mencari jalan yang terbaik, menurut lagu Pance ya, kucari jalan terbaik, sudah kita cari jalan terbaik, 7 tahun Pak, kita cari jalan terbaik, *ndak* ketemu jalannya, karena memang enggak kepingin menemui jalan. Niatnya enggak ada, kalau niat *enggak*, ada, Pak, enggak akan ketemu jalan terbaik itu, Pak. Yang tadi Bapak maksud, niat aja enggak ada, upaya tidak ada, langkah yang diambil tidak ada.

Kalau Komisi V ini *ndak* datang ke sana kemari, Pak, enggak dibuka masalah ini sudah berapa tahun? terus siapa yang berwenang coba tanya Pak Iwan tadi, siapa yang berwenang akan soal ini, jelas *kok*, tugas kita ini

sudah ada semua, Pak, ya. Saya mohon maaf, Pak. Saya harus bisa keras soal ini, karena kami juga dimarah oleh masyarakat. Datang ke sini, Pak, mulai dari sopan sampai kasar, Pak, mohon maaf bicara sama kita. DPR ini enggak lihat kah berapa banyak kesulitan yang kami alami akibat kejadian yang seperti ini. Awalnya kami dengar laporan saja, Pak, saya mau kasih tahu. Dengar, dengar, dengar, audiensi dengan teman-teman DPRD, terakhir sudahlah kita pergi ke sana *aja*. Saya enggak ikut, Pak, yang mimpin beliau ini, gambarannya seperti apa? lapangannya seperti apa? kalau sudah macet dua kiri-kanan, Pak, ini mau diapain ini barang.

Pak Bakri tadi bilang kan sampai macet jalur kiri dan jalur kanan, Pak. Jelas saja, Pak, kalau ada orang sakit di sini dalam keadaan darurat, selesai ini, Pak. Sementara yang lain menanggung keuntungan, *ngitung fulus*, itu yang Pak Iwan tadi bilang bukan *win-win solution*, Pak, *win* di *lu*, *lose* di *gue* ya, *lu win* di perusahaan, *lose* di masyarakat, Pak, *lose* di rakyat.

Saya rasa *nggak* perlu kita perpanjang, kita tunggu waktunya, kapan ini diselesaikan oleh pemerintah. Saya sebut pemerintah Pak ya, ya, Menteri PU, Kementerian Perhubungan dan Korlantas Mabes Polri itu. Sebenarnya kalau kita bicara undang-undang enggak perlu kita pakai, tinggal kita buka undang-undang jelas *kok*, bagaimana? siapa yang salah? bagaimana jalan keluarnya, tetapi ketika ada bagian dari kita ini tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, inilah yang terjadi hari ini dan ini nanti bisa jadi contoh di tempat lain, Pak ya. Maka waktu pertama kali bicara, saya bilang kurang besar apa tambang di Kaltim dengan di Kalsel, disana ditutup, Pak, jalannya kalaumereka tidak bikin jalan sendiri, aman, enggak ada keributan hari ini, semua punya jalan menuju GT-nya masing-masing. Kenapa di Jambi tidak bisa? bagian dari Republik Indonesia, *kok*.

Saya rasa cukup ya, enggak perlu lagi kita tambahkan soal ini ya. Kita berharap tinggal kita tunggu ya masyarakat Jambi. Kami dari Komisi V sudah berupaya menyampaikan ini kepada pemerintah untuk diselesaikan sebagai mestinya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sekarang mempersingkat, kita langsung ke kesimpulan, karena jam 14.00 kita ada rapat dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Saya persilakan.

Draft Kesimpulan Rapat Kerja Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Korlantas Mabes POLRI

Rabu, 15 Februari 2023

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BMKG, Badan Nasional dan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta Korlantas Polri atas penyelenggaraan dan penanganan arus mudik dan arus balik Natal 2022 dan tahun baru 2023 yang

aman, lancar, sehat, dan terkendali;

2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian penanganan lintas Pantai Selatan Jawa, termasuk perlengkapan marka jalan dan lampu penerangan jalan umum sebagai upaya mengurangi kemacetan dan mengurangi angka kecelakaan pada penyelenggaraan angkutan mudik yang akan datang;

3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kenaikan harga tiket menjelang libur hari raya pada layanan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api;

4. Komisi V DPR RI meminta BMKG dan BNPP (Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan) untuk meningkatkan desiminasi peringatan dini kepada masyarakat secara luas terhadap potensi terjadinya bencana akibat cuaca ekstrim serta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana;

5. Komisi V DPR RI meminta Korlantas Polri untuk meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait lainnya dalam penerapan larangan dan penegakan hukum terhadap kendaraan *Over Dimention Over Loading* (ODOL) yang melintas di jalan umum.

Saya tanya dulu ke...

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Pak, Ketua, saya interupsi dulu, Pak.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Oke, silakan Pak Bakri.

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Baik.

Makasih, Pak Ketua.

Saya lihat kita hampir 2 jam rapat ini separuh jam, separuh waktu kita membicarakan tentang Jambi. Saya mohon dengan sangat kalau bisa tentang Jambi dimasukkan di rapat ini supaya...

Baik.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Poin 6 ya.

6. Meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan kemacetan akibat aktivitas penambangan...

Kalau menurut saya kesimpulan kita bikin umum, enggak usah kita bikin spesifik, karena di Jambi salah satu titik, Pak, di lain titik juga nanti akan bisa seperti ini, ya. Kita bikin umum saja, ya.

Komisi V, coba Pak Hamka, Pak dosen lah, ayo, Pak dosen rangkai kata-katanya.

Ya, coba. Komisi V DPR RI meminta kepada pemerintah untuk segera mengatasi... bukan mengatasi kemacetan ya kalau menurut saya, untuk segera mencari solusi ya, menangani, coba.

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Menutup.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ayo, Pak Bakri, saya kasih kesempatan ke Bapak dulu lah. *Nah*, nanti kalau kita bikin, Bapak enggak pas kan, protes lagi, ayo, Pak Bakri aja merangkai kata-katanya.

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Komisi V DPR RI meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan kerusakan jalan akibat angkutan, kerusakan dan kemacetan akibat angkutan pertambangan, khususnya batubara... *ndak* betul, jelas ini... pertambangan khususnya.

Kalau saya diminta ya begitu, kalau saya diminta begitu. *Nah*, bukan, pertambangan, khususnya batubara dan perkebunan. *Nah*, yang melintas di jalan umum, yang, yang mempergunakan.

Coba-coba, kalau saya itu sudah penting ada. Bagi saya yang penting ada batubaranya itu.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Enggak, ini agak *anu* sedikit coba, coba dibuat lagi nomor 1

dibawahnya, ya nanti kita *compare* kan.

Komisi V DPR RI meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan jalan nasional, persoalan jalan nasional yang digunakan untuk angkutan-angkutan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kalau menurut aku ini lebih umum.

Coba saya minta pertimbangan dulu pemerintah, ke poin 7 coba, Pak Menteri, karena ini harus kita sepakati, Pak.

Pak Menteri, setuju.

Pak Hedy Rahadian silakan, *nah* ini .

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. HEDY RAHADIAN, M.SC.):

Kalau boleh usul Pak Ketua, mungkin agak dibalik, Pak.

Komisi V DPR RI meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan angkutan khusus yang menggunakan jalan umum.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Cocok, dah.

Harusnya Pak Hedy dari tadi *gitu*, keluarin ilmunya.

Baik. Ikut kata Pak Dirjen Darat, pas itu kalimatnya, ya jalan umum, titik aja, sampai di jalan umum.

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Yang batubara tadi mana?

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Hey, *dah* masuk lah disitu.

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Ada, kita cerita 2 jam, kita rapat 2 jam, 1 jam setengah kita bicara batubara.

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. HEDY RAHADIAN, M.SC.):

Pak, kalau bisa ditambahkan *aja*, Pak.

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Kalau nanti ada lagi permasalahan lain, lain lagi ceritanya, Pak, ini batubara dulu kita cerita.

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. HEDY RAHADIAN, M.SC.):

Kalau mau ada batubara spesifik, saya usul, termasuk angkutan tambang batubara, *gitu*.

F-GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Balik lagi, Pak, khususnya di Jambi *gitu*.

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Khususnya di Jambi.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Jadi gini, jadi gini, oke, ya saya baca ya.

F-PDI PERJUANGAN (IR. SUDJADI):

Saya juga khusus pasir di Magelang.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Makanya tadi, saya bilang enggak usah kita sebutkan, umum, ada nikel, ada bauksit di tempat saya, Pak, masalahnya semua sama.

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Ndak, ndak, maksud saya ini Pak Ketua, tadi kan sudah bilang berapa tahun lamanya, pingin ketegasan, kalau juga tidak fokus, berarti Ketua pun tidak tegas.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ini ngompori kompor yang sudah panas kelihatannya, Pak Bakri ini.

Baik.

Komisi V DPR RI minta kepada pemerintah, meminta kepada... kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan angkutan khusus termasuk angkutan pertambangan, enggak usah lagi pertambangan batubara, hapus saja.

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Eenggak apa-apa Ketua, batubaranya biarin, Ketua.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Hapus saja, oke.

F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, MS.):

Pertambangan dan perkebunan itu.

F-PAN (H. A. BAKRI H. M., S.E.):

Bukan batubara Medan, lain Pak, batu bara tambang ini maksudnya.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Komisi V DPR RI meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan angkutan khusus termasuk angkutan pertambangan dan perkebunan yang menggunakan jalan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sudah ya?

Pak Hedy Rahadian? Ya, baik.

Pak Menteri, cukup?

Pak Korlantas?

Cukup, Ibu?

Pak Kepala BNPP, udah?

Baik.

Dengan disepakatinya kesimpulan rapat ini, maka selesailah rapat kita pada hari ini.

Saya atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi V menyampaikan

terima kasih dan permohonan maaf manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan.

Sebelum saya akhiri, mohon izin Pak Menteri mewakili pemerintah untuk menyampaikan kata-kata penutup.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (IR. BUDI KARYA SUMADI):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom,

Om swastiastu,

Namo budaya, dan

Salam kebajikan.

Pak Ketua dan Bapak Wakil Ketua serta Anggota Komisi V yang saya hormati,

Kita sudah membahas secara detail tentang evaluasi Nataru dan kami ucapkan terima kasih baik masukannya maupun apresiasinya. Kami pastikan bahwa kami akan melakukan evaluasi dengan baik, berhadapan atau akan tanggung jawab pada saat nanti mudik lebaran.

Masukan-masukan ini akan kami jadikan sebagai suatu dasar, tidak saja evaluasi, tapi bagaimana kita merencanakan dan membuat suatu solusi agar kelancaran ini bisa terjadi.

Berkaitan dengan beberapa hal yang disampaikan berkaitan *law enforcement* berkaitan dengan angkutan-angkutan itu, kami juga setuju, kita akan memberikan dukungan, draf apa yang sudah disampaikan Komisi V DPR.

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita jalankan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dan bisa memberikan kejayaan untuk Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih.

Kita kasih *applause* sekali lagi untuk Pak Menteri dan pemerintah yang sudah sukses mengawal mudik dan balik Nataru. Semoga nanti juga, Pak, di balik dan mudik lebaran Pak Menteri berjalan dengan lancar, aman ya, Pak Menteri luar biasa, kita baca, Pak.

Ini kan karena saking sudah lama ini, masuk tahun ke 10, kita ini, Pak, mengawal Pak Menteri, kita dari tahun ke tahun lihat. Angka terus menurun kecelakaan ya, perbaikan infrastruktur juga diimbangi betul oleh Kementerian PUPR, infrastruktur yang baik, penanganan lapangan yang baik ya, kemudian penegakan hukum yang baik dari Polri, buahnya adalah nanti terjadi penurunan angka kecelakaan.

Demikian, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih, dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, rapat ini saya nyatakan selesai dan saya tutup.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Siang dan salam Sejahtera buat kita semua.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.25 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

Jakarta, 15 Februari 2023
a.n. **KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD.

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002